

**ANALISIS PENGEMBANGAN
KOTA PEKALONGAN SEBAGAI SALAH SATU
KAWASAN ANDALAN DI JAWA TENGAH**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Choliq Sabana
C4B002328

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

Juli
2007

TESIS

**ANALISIS PENGEMBANGAN
KOTA PEKALONGAN SEBAGAI SALAH SATU
KAWASAN ANDALAN DI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh

Choliq Sabana
C4B002328

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 12 Juli 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Drs. H. Wiratno, MEd

Evi Yulia Purwanti, SE, MSi

Pembimbing Pendamping,

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Tanggal,.

Ketua Program Studi

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 12 Juli 2007

(Choliq Sabana)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Karya kehidupan adalah anda memiliki tempat didunia ini. Lantas anda berada pada jajaran nomor yang memiliki nilai, bukan nomor kosong yang tidak diperhitungkan. Artinya hendaknya anda turut memiliki kontribusi dalam pembangunan semampu anda. Bukan menjadi beban yang memberatkan masyarakat anda.

Ingatlah, bahwa lebah yang mati itu akan terlempar dari sarangnya, karena dia tidak lagi bernilai. Dan pohon yang kering akan disingkirkan dari kebun, karena tidak ada lagi manfaat yang diharapkan darinya. (Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarny, 2005, Demi Masa! Beginilah Waktu Mengajari Kita...)

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan untuk:

- Sri Pujiningsih, istriku terkasih
- Ananda Aini Nur Savitri dan Saraswati Amalia Putri
- Serta Ibuku Warsini (Almarhumah), yang aku hormati dan kuteladani keluhuran budinya.

ABSTRACT

The research has purpose to identify characteristic of Pekalongan city as region key. They are high growth and high income, leading sector, and interrelatedness economy with other region. For this purpose, it's used by analysis tool : Klassen Tipology, Location Quotient (LQ), Growth Ratio Model (GRM), Overlay, Shift Share, and Gravity Model.

The results show that Pekalongan city in the classify low growth and high income region. By using LQ analys that in Pekalongan City there are almost all sectors in Pekalongan City are leading sectors, except agriculture sector and industry sector, but by using overlay and shift share analys show those true sectors have competitive advantage and specialize two sectors only, they are trading sector and finance sector.

and by using gravity model to describe there are belong to related fervent by closeness trend increasing expanded as miter cooperate in area developing, they are Batang Regency and Pekalongan Regency.

By all account have done. They can be taken conclusion that's decisioned Pekalongan city as Region key or less appropriate. Although if were observed by some leading sector or there are related economy among decision area Pekalongan City it's appropriate.

Words Key: Key Region, Klassen Tipology, Overlay, and Gravity Model.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki Kota Pekalongan sebagai kawasan andalan, yaitu wilayah tumbuh cepat, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah lain. Untuk tujuan ini digunakan alat analisis: *Klassen Tipology*, *Location Quotient (LQ)*, *Growth Ratio Model (GRM)*, *Overlay*, *Shift Share*, and *Gravity Model*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pekalongan dalam klasifikasi pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan rendah atau daerah maju tapi tertekan. Dengan analisis LQ, di hampir semua sektor di Kota pekalongan merupakan sektor unggulan kecuali sektor pertanian dan sektor industri. Namun demikian dengan analisis overay menunjukkan bahwa sektor yang benar-benar memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi hanya ada dua sektor, yaitu sektor perdagangan dan sektor keuangan. Dengan model gravitasi digambarkan bahwa Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan adalah dua daerah yang memiliki keterkaitan secara kuat dengan Kota Pekalongan dan dapat dikembangkan sebagai mitra kerjasama dalam pengembangan wilayah.

Dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan dapat ditarik suatu simpulan bahwa ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai kawasan andalan kurang tepat, namun demikian jika dilihat dari banyaknya sektor unggulan maupun adanya keterkaitan ekonomi antardaerah penetapan Kota Pekalongan dianggap tepat.

Kata Kunci: Kawasan Andalan, Overlay, dan Model Gravitasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Dzat yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Luas Pengetahuannya, Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah ” yang merupakan merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Sains Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan atas Nabiullah Muhammad SAW yang mulia dan keluarga, beserta para sahabat dan pengikutnya.

Banyaknya keterbatasan yang dihadapi, baik pengetahuan maupun pengalaman berakibat pada terhambatnya proses penyelesaian tesis ini. Namun berkat kesabaran dosen pembimbing dan dukungan keluarga serta teman-teman civitas akademika akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Wiratno, MEd dan Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. selaku dosen pembimbing. Kepada Prof. Dr FX. Sugiyanto, MS yang berkenan memberikan nasihat dan bimbingan. Kepada Sri Pujiningsih istriku terkasih yang dengan sabar mendampingi selama proses penyelesaian tesis ini. Pada Kesempatan ini pula penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, MSc selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
3. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan yang telah memberikan ijin untuk mengikuti studi lanjut di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro..

4. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan yang telah banyak memberi dukungan, terutama kepada Ibu Dr. Siti Nurhayati, MS dan Ibu Tutik Kriswandari, SE, MSi
5. Ayah dan Ibunda mertua , serta adik-adikku atas dorongan dan doa restunya.
6. Seluruh Pengelola Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan-penulisan berikutnya.

Semarang, 12 Juli 2007

Choliq Sabana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PERNYATAAN	iii	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv	
ABSTRACT	v	
ABSTRAKSI	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR TABEL	xi	
DAFTAR GAMBAR	xiii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah	9
	1.3. Tujuan Penelitian	9
	1.4. Kegunaan Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	11
	2.1. Tinjauan Pustaka	11
	2.1.1. Pembangunan dan Pertumbuhan	11
	2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	15
	2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
	2.1.4. Teori Berbasis Ekspor Atau Teori Basis Ekonomi (Economics Base Theory)	20
	2.1.5. Toeri Tempat Sentral	22
	2.1.6. Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole Theory)	23
	2.1.7. Model Gravitasi	25
	2.1.8. Penelitian Terdahulu	27
	2.2 Model Alur Pikir Teoritis	33
	2.3 Hipotesis	33
BAB III	METODE PENELITIAN	35
	3.1. Definisi Operasional Variabel	35
	3.2. Jenis Data	36

3.3. Metode Pengumpulan Data	36
3.4. Teknis Analisis	37
3.4.1. Tipologi Klassen	37
3.4.2. Metode Location Quotient	40
3.4.3. Metode Shift Share Analysis	41
3.4.4. Model Rasio Pertumbuhan	46
3.4.5. Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi	47
3.4.6. Model Rasio pertumbuhan Wilayah Studi	48
3.4.7. Metode Overlay	50
3.4.8. Model Gravitasi	51
3.5. Langkah Pengujian Hipotesis	52
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	53
4.1. Kondisi Geografis	53
4.2. Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja	54
4.2.1. Jumlah penduduk	54
4.2.2. Tenaga kerja	55
4.3. Kondisi Perekonomian	57
4.3.1. PDRB	57
4.3.2. PDRB Perkapita	57
4.4. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Kota Pekalongan	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Analisis Data	62
5.2 Klasifikasi Pertumbuhan	68
5.3 Sektor-Sektor Ungulan	72
5.3.1. Analisis Location Quotient	73
5.3.2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan	76
5.3.3. Analisis Overlay	77
5.3.4. Analisis Shift Share	80
5.4. Analisis Gravitasi	87
BAB VI PENUTUP	94
6.1. Simpulan	94
6.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Nomor :	Judul:	Halaman:
Tabel 1.1.	Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto di Kota/ Kabupaten Pusat Pengembangan Wilayah Kawasan Andalan di Jawa Tengah Tahun 2001-2005 (dalam %)	7
Tabel 2.1	Prediksi dari Model-model Pertumbuhan Regional.	20
Tabel 2.2.	Ringkasan Studi Terdahulu	30
Tabel 3.1.	Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen	38
Tabel 4.1	Jarak Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten lain se Eks karesidenan Pekalongan	54
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2005	55
Tabel 4.3	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2003 – 2005	55
Tabel 4.4	Penduduk Pencari Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2003 – 2005	56
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Utama Di Kota Pekalongan Tahun 2003 – 2005	56
Tabel 4.6	PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan dan Kontribusi Tiap Sektor Kota Pekalongan Tahun 2003 - 2005 (Juta Rupiah)	57
Tabel 4.7	PDRB Perkapita Kota Pekalongan Tahun 2003-2005	58
Tabel. 5.1	PDRB Perkapita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2003-2005	69

Tabel 5.2	LQ Rata-rata Kota Pekalongan Tahun 2003-2005	75
Tabel 5.3	Koefisien MRP PDRB Kota Pekalongan tahun 2003-2005	76
Tabel 5.4	Analisis Overlay PDRB Kota Pekalongan	79
Tabel 5.5	Analisis Shift Share Estaban Marquiles Kota Pekalongan Tahun 2003 – 2005	81
Tabel 5.6	Efek alokasi Kota Pekalongan	83
Tabel 5.7	Indeks Gravitasi dan Model Interaksi Ruang Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2003-2005	88
Tabel 5.8	Komparasi Ciri Kawasan Andalan dan Hasil Perhitungan Berbagai Alat Analisis	92

DAFTAR GAMBAR

Nomor:	Judul:	Halaman:
Gambar 1.1.	Peta Kawasan Andalan Propinsi Jawa Tengah	4
Gambar 1.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2001-2005	8
Gambar 2.1.	Model Alur Pikir Teoritis	34
Gambar 5.1.	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB di Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2003 dan 2005 (%)	63
Gambar 5.2	Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Menurut Tipologi Klassen	70
Gambar 5.3.	Peta Jarak Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten Lain Se Eks Karesidenan Pekalongan	89
Gambar 5.4.	Hasil Analisis Pengembangan Kota Pekalongan sebagai Kawasan Andalan	93

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1.	PDRB Kota Pekalongan dengan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2003-2005	101
Lampiran 2.	PDRB Jawa Tengah dengan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2003-2005	102
Lampiran 3.	Hasil Perhitungan LQ Tahun 2003	103
Lampiran 4.	Hasil Perhitungan LQ Tahun 2004	104
Lampiran 5.	Hasil Perhitungan LQ Tahun 2005	105
Lampiran 6.	Hasil Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 2003-2005	106
Lampiran 7.	Hasil Perhitungan Shift Share Modifikasi Estaban Erquiles	107
Lampiran 8.	Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi	110
Lampiran 9	Peta Kebijakan Wilayah Pembangunan Jawa Tengah	111
Lampiran 10.	Rencana Bagian Wilayah Kota	112
Lampiran 11.	Gb. 1 dan 2. Sentra Perbelanjaan Drosir Setono di Kecamatan Pekalongan Timur	113
Lampiran 12.	Gb. 3-6 Jenis Alat Transportasi	114
Lampiran 13.	Gb. 7-10 Jenis Alat Transportasi	115
Lampiran 14.	Gb. 11 dan 12 Mobilitas Tenaga Kerja	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya otonomi daerah yang paling penting bagi pembangunan daerah dewasa ini adalah meningkatnya motivasi antardaerah, mengaktualisasikan diri sebagai daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersandarkan kepada kekuatan-kekuatan daerah dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu kemakmuran dan keadilan.

Sebuah kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan kepada perencanaan strategis. Kebijakan ini perlu memandang kedudukan daerah lain sebagai "pesaing" terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, sebaliknya juga dapat berperan sebagai "*partner*" usaha untuk mengembangkan berbagai komoditi andalan terutama berkaitan dengan pasaran luar negeri (Gupa and Choudry, 1997 dalam Fashbir Noor Sidin, 2001). Apabila dihubungkan dengan globalisasi melalui kebijakan "pasar bebas" yang mengharuskan setiap negara membuka pintunya kepada berbagai barang dan jasa yang ditawarkan oleh negara lain (Berry Conkling and Ray, 1997 dalam Fashbir Noor Sidin, 2001)

Membiarkan masing-masing daerah untuk berkompetisi akan sama halnya menyerahkan pembangunan ekonomi secara nasional pada mekanisme pasar yang secara nyata telah menempatkan pada situasi semakin melebarnya jurang ketidakmerataan antardaerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah dapat disebabkan karena letak geografis, kondisi dan situasi alamiah yang ada, dan sebagainya. Ekspansi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja dan modal perdagangan yang ada akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. Khususnya perpindahan tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasi itu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang mengalami ekspansi ekonomi tersebut dan merugikan daerah-daerah lain (*back wash effect*) (Myrdal 1957 dalam Lincoln Arsyad, 1999).

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit disparitas antardaerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut diharapkan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antarwilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap antara perkembangan ekonomi daerah Jawa dan luar Jawa, dan antara KBI dan KTI (Kuncoro, 2002).

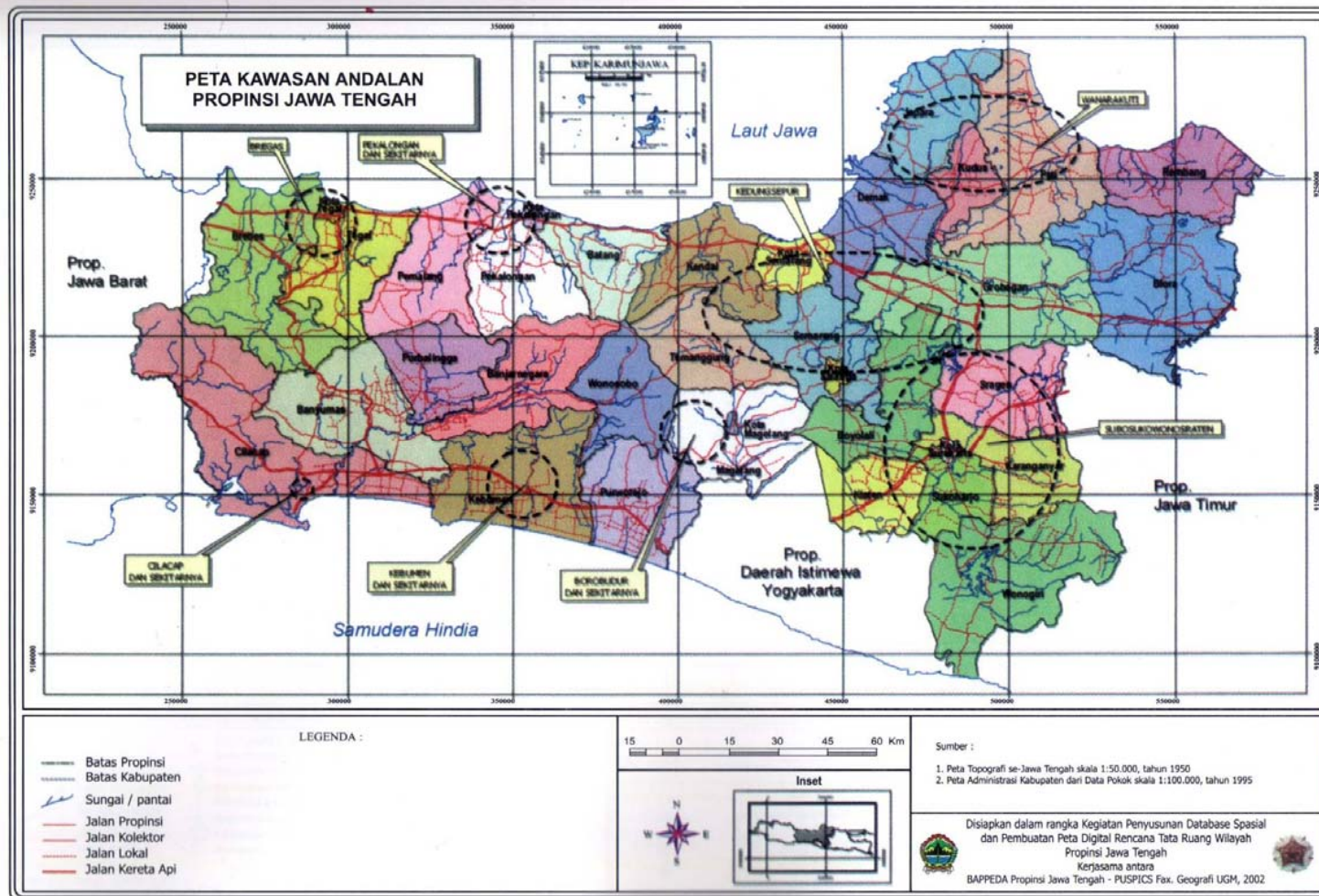
Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik itu keterpaduan antarsektor, antarsektor dan daerah, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, serta antarprovinsi dan kabupaten/ kota. Dengan keterpaduan tersebut, berarti akan terjadi kesamaan pandangan, saling isi dan tidak tumpang tindih antara program pembangunan daerah satu dengan daerah yang lain. Adapun tujuan pembangunan yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil, tersedianya lapangan berusaha, menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018 menetapkan daerah-daerah yang dijadikan kawasan andalan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Cilacap dan sekitarnya
2. Kebumen dan sekitarnya
3. Borobudur dan sekitarnya,
4. SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Klaten),
5. WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati),
6. KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi),
7. BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi).
8. Pekalongan dan sekitarnya

Untuk memberikan gambaran mengenai letak kawasan andalan Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 1.1 tentang Peta Kawasan Andalan Jawa Tengah.

Gambar 1.1. Peta Kawasan Andalan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah nasional. (RTRW Provinsi Jateng, 2003)

Konsep Kawasan Andalan menurut Royat (Kuncoro, 2002) merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibanding lokasi lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*). Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan daerah sekitar (*hinterland*), melalui pemberdayaan sektor/ subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Arah kebijakan penetapan kawasan andalan ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan.

Berdasarkan kriterianya penetapan kawasan andalan semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya faktor lain di luar faktor ekonomi. Secara konseptual kebijakan pemerintah tersebut sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan antardaerah. Namun demikian, penerapan di lapangan tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan kebijakan tersebut terutama dalam penetapan suatu daerah sebagai kawasan andalan. Akibatnya kebijakan yang ditetapkan hanyalah sebagai simbol

kepedulian terhadap realitas keterbelakangan yang dialami daerah (Kuncoro, 2002)

Indikasi perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan distribusinya serta dampaknya kepada sektor-sektor pendukung yaitu jaring produksi dan pemasaran dalam kelembagaan ekonomi serta lingkungan kondusif untuk keseimbangan dan keberlanjutannya pada masa mendatang. Kebijakan perubahan struktur perekonomian harus dikembangkan selaras dengan perkembangan global yang menantang dari segi keunggulan produk dan kemampuan bersaing (Fashbir Noor Sidin, 2001). Perkembangan ekonomi juga tercermin dari adanya transformasi struktural ekonomi yang tinggi, misalnya adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, maupun transformasi sosial dan ideologi yang tinggi yaitu adanya perubahan sikap, kelembagaan dan ideologi (Todaro, MP, 1987).

Masalah pokok dalam pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan “*endogenous development*” menggunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. (Lincoln Arsyad, 1999). Menurut Sri Adiningsih bahwa pembangunan ekonomi juga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, membawa tingkat kemakmuran masyarakat lebih tinggi dan menurunkan kemiskinan (Gatot, 2003).

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB dan pertumbuhan PDRBnya. Nilai PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK) tahun 2000 pada tahun 2005 senilai Rp. 1,701,324.23 dan laju pertumbuhan PDRB sebesar 3,83%. (PDRB Kota Pekalongan Tahun 2005). Dibanding dengan laju pertumbuhan PDRB kota/ kabupaten yang menjadi titik-titik pertumbuhan dalam kawasan andalan maupun pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah maka pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan masih lebih rendah. Secara lebih lengkap perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten lain, maupun dengan Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah di jelaskan melalui Tabel 1.1.

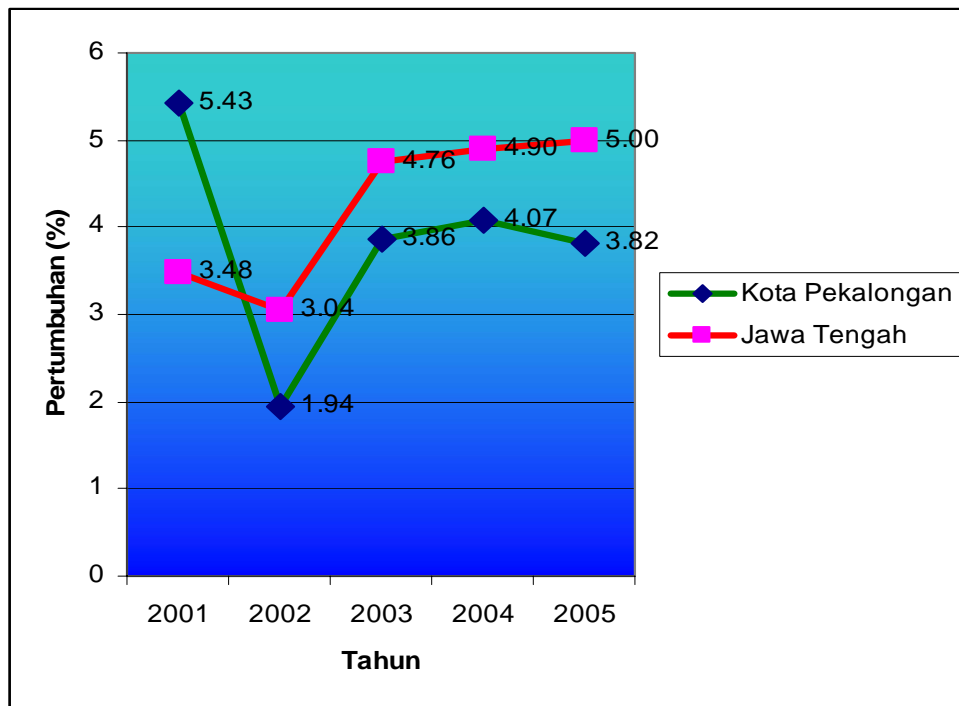
Tabel 1.1.
Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto
di Kota/ Kabupaten Pusat Pengembangan Wilayah Kawasan Andalan
di Jawa Tengah Tahun 2001-2005 (dalam %)

No	Kabupaten/ Kota	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	4.69	6.57	5.17	5.55	6.19	5.59
2	Kab. Kebumen	1.46	3.91	2.93	1.18	3.21	2.29
3	Kab. Kudus	6.06	5.44	5.56	8.7	4.23	5.83
4	Kota Magelang	3.44	3.01	3.74	3.78	5.71	3.84
5	Kota Surakarta	4.12	4.97	6.11	5.8	5.15	5.18
6	Kota Semarang	3.4	4.1	4.39	4.76	5.5	4.37
7	Kota Pekalongan	5.43	1.94	3.86	4.07	3.82	3.63
8	Kota Tegal	7.73	4.82	5.82	5.85	4.87	5.73
	Jeteng	3.48	3.4	4.76	4.90	5.00	4.25

Sumber: Data PDRB Provinsi Jawa Tengah, diolah

Untuk memperjelas kondisi laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2001-2005 dibanding dengan laju pertumbuhan rata-rata seluruh Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah atau laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar 1.2. sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2001-2005



Sumber: Data diolah

Peran Kota Pekalongan sangat strategis sebagai penggerak roda perkonomian regional Jawa Tengah maupun nasional karena berada di jalur utama Pantura. Kota Pekalongan juga memiliki prospek ekonomi yang baik dan memiliki daya tarik investasi yang baik. Dengan realita kinerja sebagaimana diuraikan diatas maka menarik untuk mengkaji dan menganalis. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul” ANALISIS PENGEMBANGAN KOTA PEKALONGAN SEBAGAI SALAH SATU KAWASAN ANDALAN DI JAWA TENGAH”

1.2. Rumusan Masalah

Sejak ditetapkan sebagai kawasan andalan tahun 2003, pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2005 masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah maupun daerah Kota/ Kabupaten lain yang menjadi kawasan andalan.

Perlu dievaluasi apakah kinerja ekonomi Kota Pekalongan selama 2003-2005 sudah dapat menunjukkan sebagai salah satu kawasan andalan di Jawa Tengah dengan kriteria cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitarnya..

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi tipologi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebagai daerah cepat tumbuh berdasarkan potensi yang dimilikinya.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Pekalongan.
3. Mengidentifikasi daerah–daerah di sekitar Kota Pekalongan yang memiliki interaksi ekonomi daerah yang kuat dengan Kota Pekalongan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah Kota Pekalongan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi regional yang berkelanjutan sehingga pemerintah dapat lebih akomodatif dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai sumber informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan kinerja masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan studi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Ursula Hicks dan Schumpeter (ML, Jhingan, 1992) membedakan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. pembangunan ekonomi mengacu pada masalah yang dihadapi negara sedang berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah negara maju. Masalah negara berkembang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum digunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal. Sedangkan negara maju terkait dengan pertumbuhan. Hal ini terkait dengan keberadaan sumber-sumber ekonomi yang ada telah digunakan pada batas tertentu.

Pembangunan menurut Schumpeter (ML, Jhingan, 1992) adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan penduduk.

Menurut Profesor Bonne (ML, Jhingan, 1992) bahwa pembangunan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan, dan pedoman

dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan. Sementara menurut Nurkse pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis. Bagi Myrdal pembangunan berarti pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial (Kuncoro 1997).

Mier (dalam Kuncoro,2002) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pendapatan perkapita riil dari suatu negara meningkat dalam periode jangka panjang. Dengan syarat bahwa jumlah penduduk yang dibawah garis kemiskinan tidak mengalami peningkatan dan distribusi pendapatan tidak lebih timpang.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan kelembagaan (Lincoln Arsyad, 1999). Hal ini mengandung pengertian: disamping adanya suatu kenaikan pendapatan perkapita riil . Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti perubahan secara terus menerus dan terjadi dalam jangka panjang, serta terdapat perbaikan sistem kelembagaan baik dari aspek organisasi maupun aspek regulasi yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, dan bidang hukum .

Menurut Michael P Todaro (1987) pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi banyak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan pada intinya harus

menampilkan perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyesuaian suatu sistem sosial kepada kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut, berpindah dari suatu kondisi yang dianggap sebagai tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau situasi kehidupan yang dianggap lebih baik secara material maupun spiritual.

Profesor Dudley Seers (Todaro, 1987) mempersoalkan hal yang paling mendasar tentang arti pembangunan yaitu lebih menekankan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Menurutnya ciri suatu negara yang sedang membangun adalah jika terdapat indikasi penurunan pada ketiga masalah tersebut.

Sementara itu Yoseph Schumpeter ahli ekonom Neo Klasik dalam bukunya "*The Theory of Economics Development*" (Lincoln Arsyad, 1999) menekankan pengusaha dalam pembangunan. Menurutnya pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmoni atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*). Pembangunan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Menurut teori pertumbuhan neo klasik ini kuncinya berada pada *entrepreneur* atau wirausaha, yaitu orang-orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional. Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Merekalah yang menciptakan inovasi pembaharuan dalam perekonomian. Pembaharuan yang diciptakan dalam bentuk;

memperluas barang baru; menggunakan cara-cara baru dalam berproduksi; memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru; mengembangkan sumber-sumber bahan mentah yang baru; mengadakan reorganisasi dalam perusahaan atau industri.

Pembangunan menurut versi Bank Dunia (2001) adalah pembangunan tidak sekedar peningkatan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, namun pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih merata, kesetaraan gender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lestari, sistem hukum dan pengadilan yang lebih adil, kebebasan politik dan sipil yang lebih luas, kehidupan kultural yang lebih kaya.

Dari uraian di atas pembangunan dapat dimaknai tidak sekedar kenaikan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi mencakup perubahan yang jauh lebih luas, yaitu sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktural sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa termasuk didalamnya kepercayaan, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pengertian pembangunan ekonomi telah mencakup dimensi yang lebih luas, terpadu dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan sebagai konsep statis dan pembangunan ekonomi adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.

Berbeda dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi lebih berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional semata tanpa memandang apakah

kenaikan itu besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terdapat perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Di dalam analisisnya Prof. Simon Kuznets memisahkan enam karakteristik proses pertumbuhan di hampir semua negara maju sebagai berikut (Todaro, MP, 1987):

Dua variabel ekonomi agregat yang meliputi: (1) laju pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi (2) tingkat kenaikan produktivitas faktor yang tinggi; terutama produktivitas tenaga kerja. Dua variabel transformasi struktural yang meliputi: (3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi dan (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. Dua faktor yang mempengaruhi tingkat penyebaran pertumbuhan internasional yang meliputi: (5) kecenderungan negara-negara yang maju perekonomian untuk menjangkau bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku, dan (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Lincoln Arsyad, 1999):

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan

perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini daerah disebut daerah homogen.

- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999)

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang meliputi pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan

potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal(daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara aktif bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan pokok antara pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah perpindahan faktor (*factor movements*). Asumsi bahwa perekonomian suatu bangsa sebagai perekonomian tertutup yang acap kali digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal sangat memperbesar peluang bagi perbedaan tingkat pertumbuhan regional, bahkan kendati stok sumber-sumber nasional telah dalam kapasitas penggunaan penuh karena dalam analisis dinamika sebenarnya, stok ini sendiri akan bertambah besar, maka tingkat

pertumbuhan suatu daerah dapat jauh lebih tinggi dari pada tingkat normal yang dicapai oleh perekonomian nasional.

Berkaitan dengan analisis pertumbuhan regional ada dua pendekatan metodologis yang sangat berbeda: mengadaptasi model-model ekonomi makro yang digunakan dalam teori pertumbuhan agragatif (dan varian-varian regional khusus seperti teori basis ekspor) atau menafsirkan pertumbuhan suatu daerah menurut dinamikanya struktur industri (seperti teori *Shift Share*). Pendekatan pertama memungkinkan suatu daerah mengidentifikasi hubungan terpenting antara perpindahan faktor-faktor dan pertumbuhan regional dengan cara yang lebih jelas. Sementara pendekatan kedua lebih berorientasi pada perubahan pola pertumbuhan regional sebagai efek netto dari keputusan-keputusan lokasi dan output yang diambil oleh perusahaan-perusahaan bisnis sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan kebutuhan input dan pasar dalam industri-industri mereka (Richardson, 2001)

Terkait dengan pertumbuhan regional menurut ada tiga kekuatan konvergensi potensial yang penting, pertama adanya kemungkinan arus faktor yang bersifat menyeimbangkan seperti diprediksi oleh model neoklasik. Tenaga kerja berpindah dari daerah-daerah upah rendah ke daerah-daerah upah tinggi, dan jika upah dan produk marginal dari modal mempunyai korelasi terbalik, modal akan mengalir menurut arah sebaliknya. Dengan demikian daerah-daerah upah rendah pun cenderung untuk bertumbuh lebih cepat. Sumber utama kedua yang menimbulkan konvergensi adalah alokasi sumber-sumber di dalam lingkungan daerah-daerah yang bersangkutan dari sektor-sektor upah rendah (seperti sektor

pertanian) ke dalam sektor-sektor produktivitas tinggi, upah tinggi, dengan demikian menaikkan pendapatan rata-rata perkapita. Di banyak negara, kebanyakan perbedaan-perbedaan regional dalam hal pendapatan perkapita dapat dicari sebabnya pada berbeda-bedanya proporsi sumber-sumber yang dipekerjakan dalam sektor pertanian. Luas lingkup bagi relokasi interm semacam ini adalah lebih besar di daerah-daerah upah rendah pertanian. Ketiga, ciri-ciri kematangan dalam daerah-daerah yang sudah lama berpendapatan tinggi dapat melambatkan kenaikan pendapatan perkapita masa mendatang. Barangkali, yang terpenting diantara ciri-ciri ini adalah habisnya kemungkinan perpindahan sumber-sumber antarsektoral dan inelastisnya fungsi-fungsi penawaran tenaga kerja (disebabkan oleh rendahnya tingkat reproduksi neto di daerah-daerah yang sudah perkotaan) (Richardson, 2001).

Pada dasarnya masih terdapat perdebatan terkait dengan model pertumbuhan regional yang diakibatkan karena ketiadaan data yang memadai untuk menguji hipotesis sehingga apakah tingkat pertumbuhan regional itu konvergen atau tidak masih dapat dianalisis secara empiris. Guna menggambarkan ciri-ciri daerah yang bertumbuh cepat menurut prediksi model-model pertumbuhan regional dijelaskan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1. Prediksi dari Model-model Pertumbuhan Regional.

Model	Ciri-ciri Daerah-daerah yang Bertumbuh Cepat			
	Tingkat Pendapatan	Arah Perpindahan Tenaga Kerja	Arah Perpindahan Modal	Pertumbuhan Interegional
Harrod Domar Neo Klasik Basis Ekspor (kapasitas tidak merupakan pembatasan)	Tinggi Rendah ?	Masuk Keluar Masuk	Masuk Masuk Keluar	Divergen Konvergensi ?

Sumber: Richardson, 2001

2.1.4. Teori Berbasis Ekspor atau Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah basis dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non basic*) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Hoover, 1984) menurut teori ini semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor basis, sedangkan sektor non basis, yang mencakup aktivitas-aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi untuk pasar lokal dan produksi input untuk produk-produk disektor basis melayani industri-industri di sektor basis maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor basis (Bendavid-Val, 1991, dalam Prasetyo, 2001)

Tieobot (dalam Prasetyo, 2001) menggambarkan pentingnya ekspor sebagai berikut: pasar ekspor dipandang sebagai penggerak perekonomian lokal. Bila kesempatan kerja yang melayani pasar ini naik atau turun, kesempatan kerja

yang melayani pasar lokal juga naik turun. Bila pabrik (ekspor) tutup, pedagang eceran (lokal) merasakan dampaknya karena para pekerja pabrik yang diberhentikan tidak memiliki uang untuk dibelanjakan. Karena peranan penggerak utama itu, kesempatan kerja ekspor dipandang sebagai “dasar” (*basic* atau basis) kesempatan kerja yang melayani pasar lokal dipandang menyesuaikan atau adaptif dan diberi istilah “non dasar” (*non basic*)

Studi basis ekonomi regional umumnya berupaya untuk menemukenali aktivitas-aktivitas ekspor wilayah, untuk meramalkan pertumbuhan di aktivitas-aktivitas itu dan mengevaluasi dampak dari kenaikan aktivitas ekspor atas aktivitas-aktivitas lain. Basis ekonomi dari sebuah komunitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja utama pada manusia yang menjadi tumpuan perekonomian. Studi basis menemukenali sumber-sumber utama (*basic*) dari pendapatan dan kesempatan kerja sebagai suatu basis ekonomi dari suatu wilayah. Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sektor dasar (*basic sector*). Pendapatan dan kesempatan kerja basis berasal dari ekspor. Industri-industri ekspor merupakan basis ekonomi atau sektor basis dari wilayah. Pendapatan dan kesempatan kerja non basis ditentukan oleh pendapatan dan kesempatan kerja basis. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\Delta T = k \Delta B$$

$$\Delta Y = k \Delta X$$

Dimana T adalah Total kesempatan kerja, k adalah pengganda berbasis ekspor atau pengganda basis ekonomi, B adalah kesempatan kerja basis / dasar (ekspor), Y adalah Total Pendapatan, dan X adalah penghasilan ekspor.

Teori Basis Ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) (Lincoln Arsyad, 1999)

Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implimentasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/ batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

2.1.5. Teori Tempat sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of place*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah. Baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Beberapa daerah dapat menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

2.1.6 Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole Teory*)

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Suatu kota dikatakan sebagai pusat pertumbuhan harus bercirikan: (1) adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, (2) adanya unsur pengganda (*multiplier effect*), (3) adanya konsentrasi geografis, (4) bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2004). Ciri-ciri pusat pertumbuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan
hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Dengan demikian kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan

menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2. Adanya unsur pengganda (*multiplier effect*)

keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Maksudnya bila ada permintaan satu sektor dari luar wilayah, peningkatan produksi sektor tersebut akan berpengaruh pada peningkatan sektor lain. Peningkatan ini akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi dapat beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan di luar untuk sektor tersebut. Unsur efek pengganda memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan kota belakangnya. Hal ini terjadi karena peningkatan berbagai sektor di kota pusat pertumbuhan akan membutuhkan berbagai pasokan baik tenaga kerja maupun bahan baku dari kota belakangnya.

3. Adanya konsentrasi geografis

konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini membuat kota tersebut menarik untuk dikunjungi dan karena volume

transaksi yang makin meningkat akan menciptakan *economic of scale* sehingga tercipta efisiensi lebih lanjut.

4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya sepanjang terdapat hubungan yang harmonis di antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan kota belakangnya maka pertumbuhan kota pusat akan mendorong pertumbuhan kota belakangnya. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai fasilitas atau kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Pusat-pusat yang pada umumnya merupakan kota-kota besar tidak hanya berkembang sangat pesat, akan tetapi mereka bertindak sebagai pompa-pompa pengisap dan memiliki daya penarik yang kuat bagi wilayah-wilayah belakangnya yang relatif statis. Wilayah-wilayah pinggiran di sekitar pusat secara berangsur-angsur berkembang menjadi masyarakat dinamis. Terdapat arus penduduk, modal, dan sumberdaya ke luar wilayah belakang yang dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan pusat-pusat dimana pertumbuhan ekonominya sangat cepat dan bersifat kumulatif. Sebagai akibatnya, perbedaan pendapatan antara pusat dan wilayah pinggiran cenderung lebih besar (Rahardjo Adisasmito, 2005).

2.1.7. Model Gravitasi

Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya

wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila suatu daerah hendak membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Artinya, fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Model ini dikenalkan oleh Carey dan Ravenstein pada abad ke 19. Model ini dikembangkan atas dasar pengamatan lapangan atau bersifat induktif. Model ini bermula dari pengamatan terhadap banyaknya jumlah migrasi ke suatu kota sangat erat terkait dengan hukum gravitasi Newton. Artinya banyaknya migrasi masuk suatu kota sangat terkait dengan besarnya kota tersebut dan jauhnya tempat asal migran tersebut.

Misalnya, ada dua kota (kota A dan B) yang berdekatan, ingin diketahui berapa besar interaksi yang terjadi antara dua kota tersebut. Interaksi bisa saja diukur dari banyaknya perjalanan dari penduduk kota A ke kota B atau sebaliknya. Faktor apa yang menentukan besarnya interaksi tersebut. Hasil pengalaman menunjukkan bahwa interaksi itu ditentukan oleh beberapa faktor dimana faktor pertama adalah besarnya kedua kota tersebut. Timbul persoalan apa ukuran yang dijadikan untuk menentukan besarnya sebuah kota. Sebuah kota dapat diukur dari jumlah penduduk, banyaknya lapangan kerja, total pendapatan, jumlah/ luas bangunan, banyaknya fasilitas kepentingan umum, dan lain-lain. Mungkin karena mudah mendapatkan data maka ukuran yang digunakan adalah jumlah penduduk. Penggunaan jumlah penduduk sebagai alat ukur bukanlah arbiter karena jumlah penduduk juga terkait langsung dengan berbagai ukuran lain

yang dikemukakan di atas. Faktor kedua yang mempengaruhi interaksi adalah jarak antara kota A dan kota B. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga dan biaya. Makin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian. Selain itu dalam hal jarak, orang mengamati bahwa minat orang bepergian menurun drastis apabila jarak itu semakin jauh, artinya penurunan minat itu tidak proporsional dengan penambahan jarak, melainkan eksponensial.

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan penentuan wilayah pembangunan dan ketimpangan regional adalah penelitian yang dilakukan Sjafrizal (1997), menyimpulkan bahwa berdasarkan Tipologi Klassen daerah maju dan tumbuh cepat adalah provinsi-provinsi yang mengalami laju pertumbuhan perkapita yang tinggi dari rata-rata seluruh provinsi. Daerah yang termasuk kedalam Maju dan tumbuh cepat di Wilayah Indonesia Bagian Barat adalah Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan barat.

Kuncoro (2002) hasil analisa mengenai evaluasi kebijakan kawasan andalan di Kalimantan Selatan secara relatif hanya didasarkan pada pendapatan perkapita, berdasarkan Tipologi Klassen daerah yang masuk maju dan cepat tumbuh adalah daerah Kabupaten Kota Baru. Sementara alat analisis Location Quotient yang digunakan memperoleh simpulan bahwa seluruh kabupaten/ Kota baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan

usaha. Artinya, semua kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan sektor unggulan dapat dipandang tepat.

Prasetyo (2001) hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali antara tahun 1985 dan tahun 1995. Dengan data kesempatan kerja total di Kabupaten Badung dan data kesempatan kerja di tiap sektor yang sama di Provinsi Bali sebagai daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan sebagai daerah acuannya. Dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menemukannya suatu industri atau sektor ekonomi dikatakan sebagai sektor basis atau bukan. Dari sembilan sektor yang dihitung yaitu enam sektor menjadi sektor basis yaitu: sektor listrik, gas, dan Air, Bangunan, perdagangan/ hotel, dan Jasa kemasyarakatan dengan nilai LQ masing-masing $LQ=1,404$, $LQ = 1,132$, $LQ = 1,532$, $LQ = 1,615$, $LQ = 1,459$, dan $LQ = 1,745$, sedangkan tiga sektor lainnya yaitu pertanian, Tambang dan Penggalian, dan Industri adalah sektor non basis dengan nilai LQ masing-masing $LQ = 0,558$, $LQ = 0,695$ dan $LQ = 0,817$. hal ini menandakan bahwa Kabupaten Badung berorientasi pada Wisata.

Prasetyo (1993) hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi DIY dengan menggunakan alat analisis Shift-Share diperoleh kesimpulan bahwa selama kurun waktu 1980 sampai 1990 sekitar 489 ribu pekerja baru di DIY adalah berkat pengaruh pertumbuhan kesempatan kerja nasional terhadap kesempatan kerja di DIY, tetapi kenaikan jumlah pekerja baru yang sebenarnya adalah sebanyak 269 ribu orang. Hal ini karena adanya pengaruh *industry mix* yang hanya meningkatkan jumlah pekerja baru sebanyak 22 ribu orang dan pengaruh

ketidakunggulan kompetitif yang menyebabkan berkurangnya tawaran pekerjaan sebanyak 215 ribu di DIY.

Di bawah ini disajikan Tabel 2.1 yang merupakan tabel rangkuman penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.2. Ringkasan Studi Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Kesimpulan
1. Apriliyanto DP (1999)	Identifikasi Potensi Kota Pekalongan Tahun 1984-1998	Analisis Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Model Rasio Pertumbuhan, Analisis Shift Share.	<ul style="list-style-type: none"> Sektor listrik, sektor industri dan perdagangan, dan sektor pertanian merupakan sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.
2. Rudi Bahrudin (1999)	Pengembangan Wilayah Provinsi DI*Y (pendekatan Teoritis)	Analisis Gravitasi Analisis Location Quotient (LQ)	<ul style="list-style-type: none"> Interaksi kota-desa yang paling erat keterkaitannya adalah Kotamadya Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Sektor basis yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor transportasi, sektor komunikasi, sektor sewa rumah, pemerintah dan jasa
3. Kuncoro (2002)	Evaluasi kebijakan kawasan andalan di Kalimantan Selatan	Analisis Tipologi kelas Analisis Location Quotient (LQ)	<ul style="list-style-type: none"> Dalam analisis Tipologi Klassen daerah yang dinyatakan maju dan cepat tumbuh adalah daerah Kabupaten Kota Baru. Dalam analisis Location Quotient seluruh Kabupaten/ Kota baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan sektor unggulan dapat dipandang tepat.
4. Taufiq M dan Syirod S (2002)	Potensi Relatif Sektor-Sektor Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan	Analisis Location Quotient (LQ) Analisis Shift Share	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan LQ sektor ekonomi yang dapat dijadikan sektor basis adalah sektor: pertanian, pertambangan minyak dan gas, dan pertambangan. Berdasarkan Shift Share sektor yang relatif dapat dikembangkan adalah sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, subsektor penggalian migas, perdagangan dan jasa Pertumbuhan ekonomi Sumatra selatan ditentukan oleh Nasional share
5. Erma Setyowati dan Rina Trisnawati (2003)	Analisis Pengembangan Potensi daerah untuk mengembangkan Wilayah di Eks-Karesidenan Surakarta	Analisis Gravitasi Analisis Location Quotient (LQ)	<ul style="list-style-type: none"> Interaksi kota-desa yang paling erat yaitu Surakarta dengan kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian aglomerasi ekonomi pusat dan desa tersebut diharapkan akan merembet ke daerah-daerah lain di wilayah Kota Surakarta. Sektor –sektor yang perlu dikembangkan adalah sektor listrik, air dan gas, sektor keuangan dan jasa-jasa.

6. Ahmad Machruf (2003)	Penentuan Sektor Unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Shift Share Analysis, Location Quotient, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio Model), rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr), Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), dan Overlay)	<ul style="list-style-type: none"> • DIY memiliki basis ekonomi pada empat sektor, yaitu (1) sektor jasa (2) sektor keuangan, persewaan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan, (3) sektor pengangkutan dan komunikasi, dan (4) sektor bangunan.
7. Maria Yuvita Gobay (2003)	Identifikasi Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua	Growth Ratio Model Analysis (MRP) Analisis Location Quotient (LQ) Overlay Analysis Tipologi Klassen Entropi Theil Index Krugman's Specialization Index Analysis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selama periode 1993-2000 kabupaten/ kota di Provinsi Papua memiliki corak perekonomian yang bervariasi pengelompokan kegiatan sektoralnya. ▪ Daerah yang dikatakan maju dan cepat tumbuh: Kabupaten Sorong ▪ Daerah Maju tertekan: Kabupaten Jayapura, Kab. Fak Fak, Kab. Manokwari, Kab. Yapen Waropen, Kab. Biak Numfor, dan Kota Jayapura. ▪ Selama periode 1993-2000 ketimpangan yang semakin menyempit ▪ Pada masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Papua memiliki potensi wilayah yang memiliki keunggulan komparatif
8. Yunison Haryanto (2005)	Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	Analisis Scalogram Analisis Grafitasi Analisis Location Quotient (LQ) Growth Ratio Model Analysis (MRP) Analisis Overlay	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di Kabupaten Banyuasin terdapat 5 kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu: Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Banyuasin II, ▪ Tiap wilayah pusat pertumbuhan didukung oleh wilayah pengembangan dengan komoditas dominan yang dapat dikategorikan sebagai komoditas unggulan dari masing-masing kecamatan.
9. Jamzani Sodik dan Nita Septia Ardiyani (2005)	Analisis Potensi Pengembangan Wilayah di Eks Karesidenan Banyumas	Analisis Gravitasi Analisis Location Quotient (LQ)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten Banyumas berpotensi untuk dikembangkan menjadi Pusat dan Kabupaten Cilacap sebagai Hinterland. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga bukan menjadi prioritas utama pengembangan. ▪ Sektor Unggulan di Kabupaten Banyumas adalah sektor keuangan, persewaan. ▪ sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor basis di Kabupaten Cilacap.

<p>10. Wiyadi dan Ernawati (2002)</p>	<p>Analisis Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah Di Eks - Karesidenan Surakarta Menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan</p>	<p>Analisis Location Quotient, dan Model Gravitasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Surakarta : sektor listrik , gas, dan air, bangunan dan konstruksi, angkutan dan komunikasi, keuangan dan sektor jasa-jasa. • Kabupaten Sukoharjo : sektor pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air, keuangan dan sektor jasa-jasa. • Kabupaten Klaten : sektor pertanian, bangunan dan konstruksi, perdagangan, keuangan dan sektor jasa-jasa. • Kabupaten Boyolali : sektor pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air, keuangan dan sektor jasa-jasa. • Kabupaten Karanganyar : sektor industri, listrik, gas, dan air dan sektor jasa-jasa. • Kabupaten Sragen.: sektor pertanian, pertambangan, bangunan dan konstruksi, keuangan dan sektor jasa-jasa. • Kabupaten Wonogiri : sektor listrik, gas dan air, bangunan dan konstruksi, angkutan dan komunikasi, keuangan dan sektor jasa-jasa. • Berdasarkan perhitungan dengan indeks gravitasi dan model interaksi ruang maka interaksi kota-desa yang paling erat adalah kota Surakarta dengan kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian aglomerasi ekonomi pusat-desa tersebut diharapkan dapat merembet ke daerah-daerah lain di wilayah kodya Surakarta. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dikembangkan di pusat-desa tersebut adalah pada sektor listrik, air dan gas, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa.
---------------------------------------	---	---	--

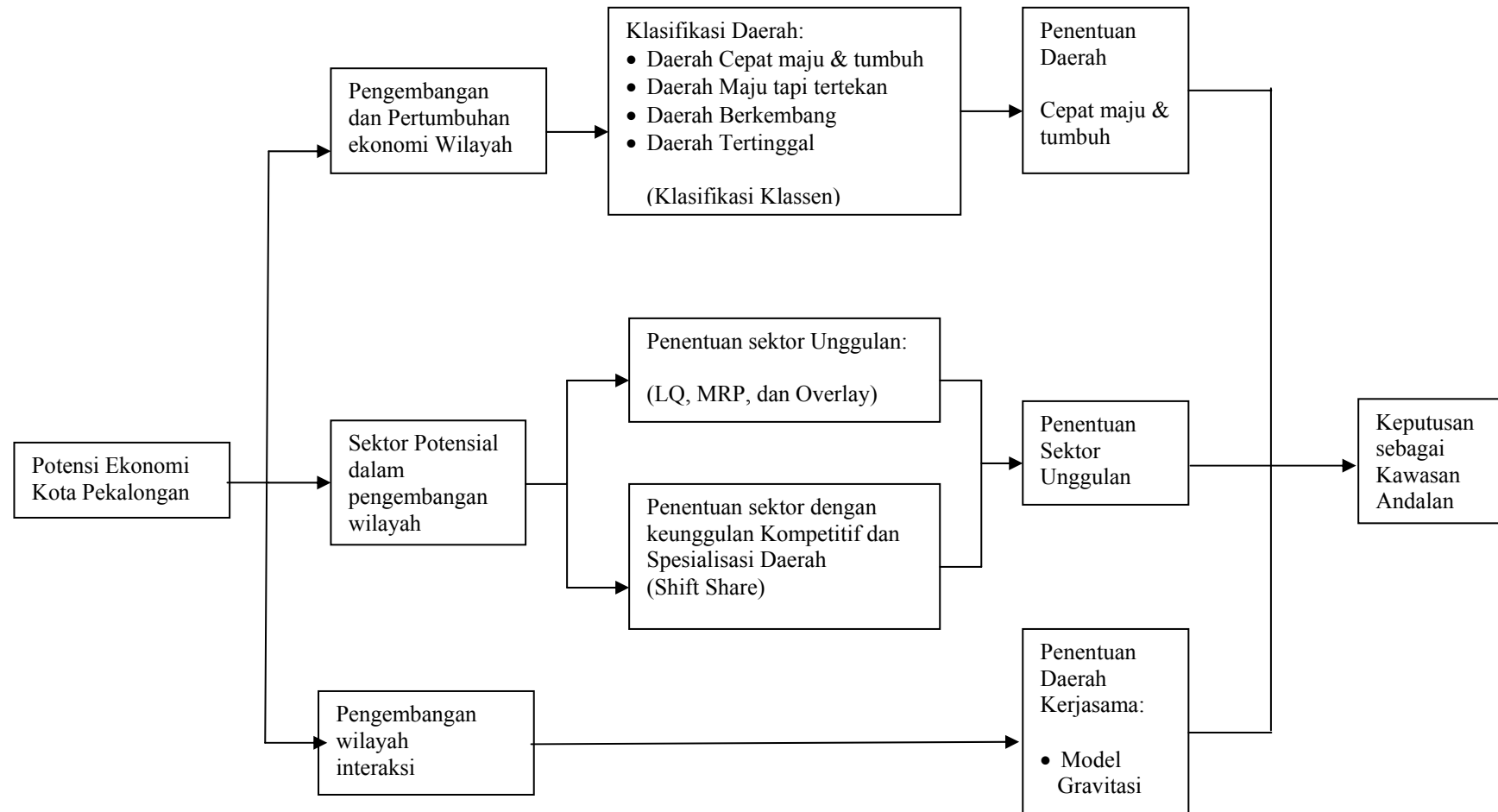
2.2. Model Alur Pikir Teoritis

Konsep Kawasan Andalan menurut Royat (Kuncoro, 2002) merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang **cepat tumbuh** dibanding lokasi lainnya dalam suatu provinsi, memiliki **sektor unggulan** dan memiliki **keterkaitan ekonomi** daerah sekitar (*hinterland*). Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan daerah sekitar (*hinterland*), melalui pemberdayaan sektor/ subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Arah kebijakan penetapan kawasan andalan ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan. Guna memperjelas pengembangan alur pikir penelitian ini, disajikan gambar 2.1.

2.3. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah: Kota Pekalongan belum siap menjadi Kawasan andalan, dalam kurun waktu tahun 2003-2005

Gambar 2.1. Model Alur Pikir Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah definisi variabel yang menjadi kriteria kawasan andalan yaitu:

- a. Perekonomian Cepat Tumbuh diukur dengan katagori Tipologi Klassen yaitu jika perekonomian wilayah studi (Kota Pekalongan) tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah).
- b. Sektor Unggulan adalah: sektor tersebut cenderung akan mengekspor outputnya ke wilayah lain, atau mungkin ekspor ke luar negeri. Diukur dengan: metode metode LQ yang memiliki nilai lebih dari 1 ($LQ > 1$), dan metode Overlay yang memiliki nilai positif. Adapun sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi diukur dengan metode shift share dengan nilai perubahan sektor ($E_{ij} - E_{ij}'$) dan pertumbuhannya ($r_{ij} - r_{in}$) memiliki nilai positif.
- c. Interaksi Ekonomi Daerah adalah interaksi ekonomi daerah dengan menganggap suatu Kota Pekalongan sebagai Pusat dan daerah lain menjadi *hinterlandnya*.

3.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode pengamatan tahun 2003 – 2005. Data-data ini diperoleh dari berbagai penerbitan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan dari kantor atau dinas yang terkait dengan penelitian ini. Data-data ini meliputi:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekalongan.
3. Pendapatan perkapita, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes
4. Jumlah Penduduk Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes
5. Jarak Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mempelajari buku-buku terbitan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan seperti Biro Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, Kantor Perdagangan dan Perindustrian, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang mempunyai

relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui perpustakaan dan *download* internet.

3.4. Teknik Analisis

Penelitian ini bertujuan: *pertama* Mengidentifikasi tipologi pertumbuhan daerah cepat tumbuh berdasarkan potensi yang dimilikinya. Untuk tujuan ini digunakan teknik analisis Tipologi Klassen:

3.4.1. Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993; Hil, 1989) (Kuncoro, 2002)

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh*, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi .
2. *Daerah Maju Tapi Tertekan*, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi .
3. *Daerah Berkembang* adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi .
4. *Daerah Relatif Tertinggal*, yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi .

Tabel 3.1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

PDRB perkapita Laju pertumbuhan	$y^1 > y$	$y^1 < y$
$r^1 > r$	DAERAH MAJU DAN TUMBUH CEPAT Pendapatan tinggi Pertumbuhan tinggi	DAERAH BERKEMBANG Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
$r^1 < r$	DAERAH MAJU TETAPI TERTEKAN Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	DAERAH RELATIF TERTINGAL Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber: Syafrizal (1997)

Keterangan :

y : pendapatan perkapita provinsi

r : pertumbuhan PDRB provinsi

y^1 : pendapatan perkapita kota/ Kab.

r^1 : pertumbuhan PDRB kota/ Kab.

Untuk menghitung rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah digunakan rumus rata-rata ukur (*Geometric mean*) sebagai berikut(Samsubar Saleh, 1990):

$$\text{LogMg} = 1 / N \sum_{i=1}^N \log x_i$$

Keterangan:

Mg = Rata-rata pertumbuhan

N = Jumlah tahun pengamatan

Xi = Pertumbuhan tiap tahun

Untuk menghitung rata-rata PDRB Perkapita pertahun Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah digunakan rumus rata-rata hitung. Rata-rata hitung menunjukkan nilai rata-rata dan pada data yang tersedia dimana rata-rata hitung merupakan penjumlahan bilangan/ nilai daripada pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan yang ada (Samsubar Saleh, 1990): rumus rata-rata hitung adalah sebagai berikut:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N Xi}{N}$$

Keterangan:

μ = Rata- rata pendapatan perkapita

N = jumlah tahun pengamatan

X_i = Pendapatan perkapita tiap tahun

Tujuan penelitian yang Kedua adalah mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Pekalongan. Untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian tersebut digunakan teknik analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share Analysis (SS)*., Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs).

3.4.2. Metode *Location Quotient*

Dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{q_i / q_r}{Q_i / Q_n}$$

Keterangan

LQ= Koefisien Location Quotient

Q_i = Output sektor i wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah)

q_i = Output sektor i wilayah Studi (Kota Pekalongan)

Q_n = Output total wilayah referensi (Provinsi Jawa Tengah)

q_r = Output total wilayah studi (Kota Pekalongan)

Kriteria pengukuran LQ menurut Bendavid Val, (1991:74, Kuncoro, 2002) yaitu bila $LQ > 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama ditingkat nasional. Bila $LQ < 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional, dan bila $LQ = 1$: berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. Bila nilai $LQ > 1$ berarti subsektor tersebut merupakan sub sektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ berarti subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

3.4.3. Metode Shift Share Analysis

Analisis shift share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah studi dengan wilayah nasional. Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor

penyebab perubahan sedangkan metode *shift share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai faktor di suatu daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional (Robinson Tarigan, 2004)

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan yang dilakukan. Bila penyimpangannya positif, maka suatu sektor dalam daerah memiliki keunggulan kompetitif. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel daerah, pendapatan atau output selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh : pertumbuhan nasional (N), bauran industri/*industry mix* (M) dan keunggulan kompetitif (C). Dengan demikian pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran industri (*industry mix*) disebut proporsional *shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share* atau *differential shift*.

Bentuk umum persamaan dari komponen-komponen *Shift Share Analysis* adalah sebagai berikut :

Untuk industri atau sektor i di wilayah j yaitu :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (1)$$

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_{ij} - E_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \quad (3)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n) \quad (4)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (5)$$

Dimana : r_{ij} , r_{in} dan r_n mewakili laju pertumbuhan daerah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(E_{ij}^* - E_{ij})}{E_{ij}} \quad (6)$$

$$r_{in} = \frac{(E_{in}^* - E_{in})}{E_{in}} \quad (7)$$

$$r_n = \frac{(E_n^* - E_n)}{E_n} \quad (8)$$

Dengan demikian D_{ij} dapat diformulasikan sebagai beriku:

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (9)$$

Keterangan :

E_{ij} = PDRB sektor i di wilayah j (studi)

E_{in} = PDRB sektor i di wilayah referensi

E_n = PDRB wilayah referensi

Dalam penelitian ini analisis shift share yang digunakan adalah analisis shift share dengan modifikasi Estaban Marquiles (E-M) dengan tujuan untuk menutup kekurangan dari analisis Shift Share klasik. Modifikasi ini meliputi pendefinisian kembali kedudukan / keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dan teknik S-S klasik dan menciptakan komponen S-S yang ke empat yakni pengaruh alokasi.

Persamaan S-S yang direvisi itu mengandung suatu unsur baru, yakni *homothetic employment* di sektor i di wilayah j , diberi notasi E'_{ij} dan dirumuskan sebagai berikut:

$$E'_{ij} = E_j (E_{in} / E_n) \quad (10)$$

E'_{ij} didefinisikan sebagai employment atau output atau pendapatan atau nilai tambah yang dicapai sektor i di wilayah j bila struktur kesempatan kerja di wilayah itu sama dengan struktur nasional. Dengan mengganti kesempatan kerja nyata, E_{ij} dengan homothetic employment, E'_{ij} persamaan (5) diubah menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (11)$$

C'_{ij} mengukur keunggulan atau ketidak unggulan kompetitif di sektor i di perekonomian suatu wilayah.

Bagian yang belum dijelaskan dari perubahan suatu variabel wilayah (*employment*) atau D-M-N-C disebut allocation effect. Untuk sektor *i* di wilayah *j*, pengaruh alokasi, *Aij* dirumuskan sebagai berikut:

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_{in}) \quad (12)$$

Aij adalah bagian dari pengaruh (keunggulan) kompetitif tradisional (klasik) yang menunjukkan adanya tingkat spesialisasi di sektor *i* di wilayah *j*. Dengan perkataan lain *Aij* adalah perbedaan antara kesempatan kerja nyata di sektor *i* di wilayah *j* dan kesempatan kerja di sektor wilayah itu (*rij*) bila struktur kesempatan kerja wilayah sama dengan struktur kesempatan kerja nasional dan nilai perbedaan itu dikalikan dengan perbedaan antara laju pertumbuhan sektor di wilayah itu (*rij*) dan laju pertumbuhan sektor nasional (*rin*) (Beck & Herz; 1990, dalam Prasetyo Soepomo, 1993).

Lebih jelasnya persamaan (12) menunjukkan bahwa nilai suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Maksudnya, efek alokasi *Aij* itu dapat positif atau negatif. efek alokasi yang positif mempunyai dua kemungkinan: pertama $E_{ij} - E'_{ij} < 0$ dan $r_{ij} - r_{in} < 0$ dan kedua $E_{ij} - E'_{ij} > 0$, dan $E_{ij} - E'_{ij} > 0$ dengan sendirinya efek alokasi yang negatif mempunyai dua kemungkinan yang

berkebalikan dengan efek alokasi yang positif tersebut di atas.

Modifikasi E-M terhadap S-S adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot m + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) + (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_{in}) \quad (13)$$

3.4.4. Model Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio Model*)

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis alternatif yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh dengan memodifikasi model analisis *Shift-Share*. Model ini diturunkan dari persamaan awal komponen utama dalam analisis *Shift and Share* yakni, *Differential Shift* dan *Proportionality Shift*.

Secara matematik *Differential Shift* dapat ditulis sebagai beriku

$$D_{ij} = \left[\frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij}} - \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} \right] E_{ij} (t) \quad (14)$$

Proportionality Shift dapat ditulis secara sistematis :

$$P_{ij} = \left[\frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} - \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \right] E_{ij} (t) \quad (15)$$

$$\Delta E_{iR} = E_{iR(t+n)} - E_{iR(t)}$$

$$\Delta E_R = E_{R(t+n)} - E_{R(t)}$$

Keterangan :

ΔE_{ij} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah studi pada periode waktu t dan t + n,

n adalah tahun antara dua periode,

ΔE_{iR} adalah perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi

ΔE_R adalah perubahan pendapatan kegiatan di wilayah referensi

E_{ij} adalah pendapatan kegiatan i di wilayah studi,

E_{iR} adalah pendapatan kegiatan i di wilayah referensi

E_R adalah pendapatan di wilayah referensi

3.4.5. Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR)

RPR adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi

$$\frac{P_{ij}}{E_{ij(t)}} = \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} - \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \quad (16)$$

$$= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} E_{R(t)}} - \frac{\Delta E_R E_{iR(t)}}{E_{R(t)} E_{iR(t)}} \quad (17)$$

$$= \left[\frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} E_{R(t)}} - 1 \right] \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \quad (18)$$

$$= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} E_{R(t)}} \times \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} \quad (19)$$

$$= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR} \Delta E_R} \quad (20)$$

$$\frac{P_{ij}}{E_{ij(t)}} \cdot \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} = \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR} \Delta E_R} - 1 \quad (21)$$

$$\frac{P_{ij} E_{R(t)}}{E_{ij(t)} \Delta E_R} + 1 = \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} \Delta E_{iR}} \quad (22)$$

$$= \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} \cdot \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} \quad (23)$$

$$= \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}} \quad (24)$$

$$\boxed{RP_R = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}} \quad (25)$$

3.4.6. Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

RPs adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi

$$D_{ij} = \left[\frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij(t)}} - \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} \right] E_{ij(t)} \quad (26)$$

$$D_{ij} = \left[\frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij(t)}} E_{ij(t)} \right] - \left[\frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} E_{ij(t)} \right] \quad (27)$$

$$D_{ij} = \frac{\Delta E_{iR} - \Delta E_{ij(t)}}{E_{iR(t)}} \quad (28)$$

$$\frac{\Delta E_{iR} \cdot E_{R(t)}}{E_{iR(t)} \cdot E_{R(t)}} \times \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} \quad (29)$$

$$\frac{D_{ij} E_{iR(t)}}{\Delta E_{iR} \cdot E_{ij(t)}} = \frac{\Delta E_{ij} E_{iR(t)}}{\Delta E_{iR} E_{ij(t)}} - 1 \quad (30)$$

$$= \frac{\Delta E_{iR} \cdot \Delta R(t)}{E_{iR(t)} \cdot E_{R(t)}} \times \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} \quad (31)$$

$$= \frac{\Delta E_{ij} \cdot E_{iR(t)}}{E_{ij} \cdot \Delta E_{iR}} \quad (32)$$

$$\boxed{RP_s = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{R(t)}}} \quad (33)$$

Hasil perhitungan model ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi 1, yaitu nilai $RP_R (+)$ dan $RP_S (+)$ berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula pada tingkat kota/ kabupaten, kegiatan ini disebut sebagai dominan pertumbuhan
2. Klasifikasi 2, yaitu nilai $RP_R (+)$ dan $RP_S (-)$ berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat kota/ kabupaten belum menonjol

3. Klasifikasi 3, yaitu nilai RPR (-) dan RPs (+) berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada tingkat kota/ kabupaten termasuk menonjol
4. Klasifikasi 4, yaitu nilai RPR (-) dan RPs (-) berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan rendah demikian pula pada tingkat kota/ kabupaten.

3.4.7. Metode Overlay

Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode LQ dengan metode Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs). Metode ini memberikan penilaian kepada sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai positif (+) dan negatif (-). Sektor yang jumlah nilai positif (+). Paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan begitu juga sebaliknya jika nilai suatu sektor tidak mempunyai nilai positif berarti sektor tersebut bukan sektor unggulan. Notasi positif berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu, dan negatif kurang dari satu. RPR bernotasi positif berarti pertumbuhan sektorr i lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan total diwilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih dibanding pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Sementara untuk metode LQ nilai positif hanyan diberikan pada sektor ekonomi yang nilai koefisien LQ lebih dari 1 ($LQ > 1$).

Tujuan penelitian ketiga untuk mengidentifikasi daerah – daerah di sekitar Kota Pekalongan yang memiliki interaksi ekonomi daerah yang kuat dengan Kota Pekalongan. Untuk tujuan ini digunakan Model Gravitasi.

3.4.8. Model Gravitasi

Analisis ini digunakan untuk mencari wilayah mana di sekitar Kota Pekalongan yang berpotensi kuat dalam pertumbuhannya. Adanya interaksi antara desa-kota menunjukkan eratnya hubungan antara wilayah 1 dengan wilayah 2 sebagai konsekuensi interaksi kota-desa dalam teori pusat pertumbuhan.

Adapun rumus untuk menghitung interaksi dalam hubungan desa-kota adalah (Suwarjoko dalam Wiyadi dan Rina Trisnawati, 2002)

$$I_{1,2} = a (W_1 P_1) (W_2 P_2) / J_{1,2}^b$$

Keterangan :

$I_{1,2}$: Interaksi dalam wilayah 1 dan 2

W_1 : pendapatan perkapita wilayah 1

W_2 : pendapatan perkapita wilayah 2

P_1 : Jumlah penduduk wilayah 1

P_2 : Jumlah penduduk wilayah 2

$J_{1,2}$: jarak antara wilayah 1 dan 2 (dalam meter)

a : konstanta yang nilainya 1

b : konstanta yang nilainya 2.

Nilai $I_{1,2}$, menunjukkan eratnya hubungan antara wilayah 1 dan 2, semakin besar nilai $I_{1,2}$, maka semakin erat hubungan antara dua wilayah, dengan demikian semakin banyak pula perjalanan ekonomi yang terjadi sebagai konsekuensi interaksi kota-desa dalam regional (Badrudin dalam Jamzani Sodik dan Nia Septia Ardyani, 2005)

3.5. Langkah Pengujian Hipotesis:

Langkah yang ditempuh untuk menguji hipotesis ini adalah: setelah menentukan hipotesis kemudian mengkomparasikan dengan hasil temuan melalui berbagai alat analisis yang digunakan selanjutnya diambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis

Kota Pekalongan membentang antara $6^{\circ}50'42''$ – $6^{\circ}55'44''$ LS dan $109^{\circ}37'55''$ – $109^{\circ}42'19''$ BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 Km membujur dan 517,75 – 526,75 Km melintang. Luas Kota Pekalongan adalah 45,25 Km² atau 0,14 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang seluas 3254 ribu Km². Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 Km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai ± 7 Km. Secara Administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 (empat) Kecamatan yang tiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan:

- a. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 kelurahan.
- b. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 kelurahan
- c. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 kelurahan
- d. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 8 kelurahan

Di sebelah utara, wilayah Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang. Jarak Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jarak Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten lain
se Eks karesidenan Pekalongan

No	Kota	Jarak dari Kota Pekalongan (Km)
1	Kabupaten Pekalongan (Kajen)	28
2	Kabupaten Batang	8
3	Kabupaten Pemalang	35
4	Kabupaten Brebes	78
5	Kota Tegal	65
6	Kabupaten Tegal (Slawi)	80

Sumber: data diolah

4.2. Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja

4.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2005 tercatat 267.574 jiwa, terdiri dari 132.278 jiwa (49,44%) penduduk laki-laki dan 135.221 jiwa (50,56%) penduduk perempuan. Perbandingan sex rasio penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 98% (Pekalongan dalam Angka Tahun 2005).

Dilihat dari persebaran penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah mencapai 83.628 jiwa, Kecamatan Pekalongan Utara (71.499 jiwa), Kecamatan Pekalongan Timur (62.137 jiwa), dan Kecamatan Pekalongan Selatan (50.130 jiwa). dibanding dengan luas wilayah per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalongan Barat yaitu sebesar 8.321 jiwa per Km², dan kepadatan terendah adalah kecamatan Pekalongan Utara (4.642 jiwa Km²). Lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2005

No	Kecamatan	Luas Daerah Km ²	Jumlah penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Pekalongan Barat	10.05	83.628	8.321
2	Pekalongan Timur	9.52	62.317	6.546
3	Pekalongan Selatan	10.80	50.130	4.642
4	Pekalongan Utara	14.88	71.499	4.805
Jumlah		45.25	267.574	5.913

Sumber : Pekalongan dalam Angka Tahun 2005

Selanjutnya pada Tabel 4.3 terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2003 sampai tahun 2005 berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 1% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2003 (0,26 %).

Tabel : 4.3
Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekalongan
Tahun 2003 – 2005

Tahun	Total	Prosentase Pertumbuhan (%)
2003	264.217	0,26
2004	264.932	0,27
2005	267.574	1.00

Sumber : Pekalongan dalam angka, 2005.

4.2.2. Tenaga Kerja

Banyaknya penduduk pencari kerja tahun 2005 berjumlah 3.410 jiwa. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2004 dan tahun 2003. dilihat dari rata-rata pertahunnya jumlah pencari kerja menjadi 4.111 jiwa. Dilihat dari tingkat pendidikannya jumlah pencari kerja terbanyak adalah berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 1.937 jiwa (56,80%). Penduduk

pencari kerja berpendidikan SLTA pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun 2004 meningkat sebesar 321 jiwa (19,86). Lihat Tabel 4.4.

Tabel: 4.4
Penduduk Pencari Kerja di Kota Pekalongan
Tahun 2003 - 2005

Tahun	SD	SMP	SMA	Sarmud	Sarjana	Total
2003	54	541	3.961	257	820	5633
2004	60	298	1.616	646	998	3618
2005	60	268	1.937	325	820	3410

Sumber : Pekalongan Dalam Angka Tahun 2005

Tabel 4.5 memperlihatkan banyaknya penduduk Kota Pekalongan yang bekerja diberbagai lapangan usaha pada tahun 2005 sebanyak 24.930 orang. Sebanyak 17.415 orang (70,%) terserap disektor industri, sebanyak 1.300 orang (5,21%) terserap di sektor perdagangan. Dibandingkan dengan tahun 2004 penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan sektor perdagangan masing-masing sebesar 21 orang (0,01%) dan 23 orang (1,80%).

Tabel: 4.5
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Utama
Di Kota Pekalongan Tahun 2003 – 2005

No	Lapangan Usaha	Jumlah		
		2003	2004	2005
1	Pertanian	2.497	2.497	2.508
2	Pertambangan	0	0	0
3	Industri	17.438	17.493	17.515
4	Listrik, Gas, Air Minum	164	174	196
5	Bangunan	702	709	721
6	Perdagangan	1.203	1.277	1.300
7	Angkutan	942	942	974
8	Keuangan	887	887	894
9	Jasa	814	805	823
	Jumlah	24.755	24.784	24.930

Sumber : Pekalongan Dalam Angka, Tahun 2003, 2004, dan 2005

4.3. Kondisi Perekonomian

4.3.1. PDRB

PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2005 PDRB dengan perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 senilai Rp. 1,701,324.23 juta dibanding tahun 2003 telah mengalami peningkatan senilai Rp 126.560.59 juta (8,04%). Untuk mengetahui besarnya nilai PDRB dan kontribusi tiap sektor di Kota Pekalongan selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
PDRB Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan dan Kontribusi Tiap Sektor Kota Pekalongan Tahun 2003 -2005 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2003		2004		2005	
		nilai	(%)	nilai	(%)	nilai	(%)
1	Pertanian	223,317.30	14.18	247,900.86	0.15	220,482.44	12.96
2	Pertambangan	0	0	0	0	0	0
3	Industri	322,248.05	20.46	330,239.24	20.15	354,605.57	20.84
4	Listrik	13,921.69	0.88	14,118.60	0.86	17,059.23	1.00
5	Bangunan	183,086.25	11.63	181,261.21	11.06	199,211.60	11.71
6	Perdagangan	396,539.81	25.18	418,977.18	25.57	439,455.91	25.83
7	Pengangkutan	163,440.66	10.38	166,402.36	10.15	174,126.33	10.23
8	Keuangan	102,358.27	6.50	105,390.19	6.43	113,163.30	6.65
9	Jasa-Jasa	169,851.61	10.79	174,501.90	10.65	183,219.86	10.77
PDRB tanpa migas		1,574,763.64	100	1,638,791.54	100	1,701,324.24	100

Sumber : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2005, diolah

4.3.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan bagian terpenting dalam mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Secara riil PDRB perkapita menunjukkan kemampuan daya beli penduduk. Pada tahun 2003 PDRB perkapita Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000

senilai Rp. 5.785.148,27, pada tahun 2004 menjadi Rp. 5.967.357,58 dan pada tahun 2005 menjadi senilai Rp. 5.989.228,64 (lihat Tabel 4.7.)

Tabel: 4.7.
PDRB Perkapita Kota Pekalongan
Tahun 2003-2005

Tahun	Nilai
2003	5.785.148,27
2004	5.967.357,58
2005	5.989.228,64

Sumber: PDRB Kota Pekalongan Tahun 2005

4.4. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan terletak diantara 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan serta dilalui oleh arus lalu-lintas nasional yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang. Kondisi ini berimplikasi terhadap arus pergerakan sumber-sumber ekonomi melewati Kota Pekalongan dan menjadi insentif bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan Kota Pekalongan. Kecenderungan perkembangan Kota Pekalongan lebih bersifat linier, daerah-daerah yang berkembang terkonsentrasi pada daerah sekitar jalan utama kota yang dilalui oleh arus lalu lintas utama yang menghubungkan kota-kota besar yaitu lalu-lintas pantura. Hal ini menyebabkan secara berangsur angsur perkembangan Kota Pekalongan bergerak ke arah Barat dan Timur di sepanjang jalan raya tersebut. Perkembangan paling kuat ke arah barat (menuju Jakarta) dan ke timur (menuju arah Semarang). Perkembangan ke arah utara relatif kecil, sementara ke arah selatan menuju Kabupaten Pekalongan (Kajen) relatif cukup kuat. Akibat adanya tarikan

yang kurang seimbang antara barat-timur dan utara-selatan tersebut, mengakibatkan sebagian besar komponen utama kota terpusat di sekitar jalan utama kota tersebut, sehingga banyak menimbulkan persoalan spasial kota.

Dari kondisi perkembangan tersebut, maka perlu dikembangkan bentuk kota yang lebih menyatu agar pergerakan dan pola kehidupan masyarakat Kota Pekalongan lebih sehat dan teratur serta merata dalam perkembangannya. Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah di Kota Pekalongan sangat dibutuhkan sistem jaringan transportasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas intrawilayah dan antarwilayah.

Pada dasarnya kebijakan spasial jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekalongan Tahun 2003, kebijakan pengembangan Kota Pekalongan dibagi menurut Bagian Wilayah Kota (BWK) yang masing-masing BWK memiliki pusat kegiatan sesuai dengan besaran satuan lingkungannya (lihat Lampiran 10). Dalam RUTRK Pekalongan, struktur Kota Pekalongan dikembangkan sebagai berikut:

1. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota (BWK-PK)

BWK-PK merupakan pusat kota yang mencakup wilayah sebagian Kecamatan Pekalongan Utara, sebagian Kecamatan Pekalongan Timur. Wilayah ini dijadikan wilayah pusat perdagangan dan wisata tertutup.

2. Bagian Wilayah Kota A (BWK-A)

BWK-A mencakup wilayah sebagian Kecamatan Pekalongan Utara, sebagian Kecamatan Pekalongan Timur. Wilayah ini dijadikan wilayah pengembangan: rekreasi pantai, konservasi pantai, dan pengembangan pelabuhan perikanan

3. Bagian Wilayah Kota B (BWK-B)

BWK-B mencakup wilayah sebagian Kecamatan Pekalongan Timur, sebagian Kecamatan Pekalongan Selatan. Wilayah ini dijadikan wilayah pengembangan simpul-simpul transportasi, sentra pemasaran batik dan komoditas unggulan Kota Pekalongan, pengembangan perhotelan, dan pengembangan *islamic centre*.

4. Bagian Wilayah Kota C (BWK-C)

BWK-C mencakup wilayah sebagian Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagian Kecamatan Pekalongan Barat. Wilayah ini dijadikan wilayah pengembangan pendidikan, sentra industri kerajinan, perhotelan, pusat pemerintahan/ perkantoran, dan pusat gelanggang olah raga

5. Bagian Wilayah Kota D (BWK-D)

BWK-D mencakup wilayah sebagian besar Kecamatan Pekalongan Utara, sebagian Kecamatan Pekalongan Barat. Wilayah ini dijadikan wilayah pengembangan pelabuhan perikanan, gelanggang olah raga, kawasan industri, pusat pelayanan kesehatan, rekreasi pantai, konservasi pantai, perhotelan, dan simpul kereta api.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dimensi pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah pada pasal 27 dijelaskan tentang pengembangan kawasan prioritas yang bersifat strategis ditetapkan dengan skala pandang nasional dan daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya. Pengembangan kawasan prioritas meliputi pengembangan kawasan andalan, pengembangan kawasan strategis pertumbuhan yang berpotensi untuk pengembangan pelayanan nasional, dan kawasan strategis pertumbuhan cepat, pemerataan dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan kawasan andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan di sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Kawasan prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh berdampak nasional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003)

Kawasan andalan ini merupakan kawasan yang berpotensi untuk tumbuh cepat dibanding dengan wilayah lainnya dalam satu provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan andalan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi wilayah yang berada disekitarnya sehingga dapat terbentuk pusat-pusat pertumbuhan yang baru.

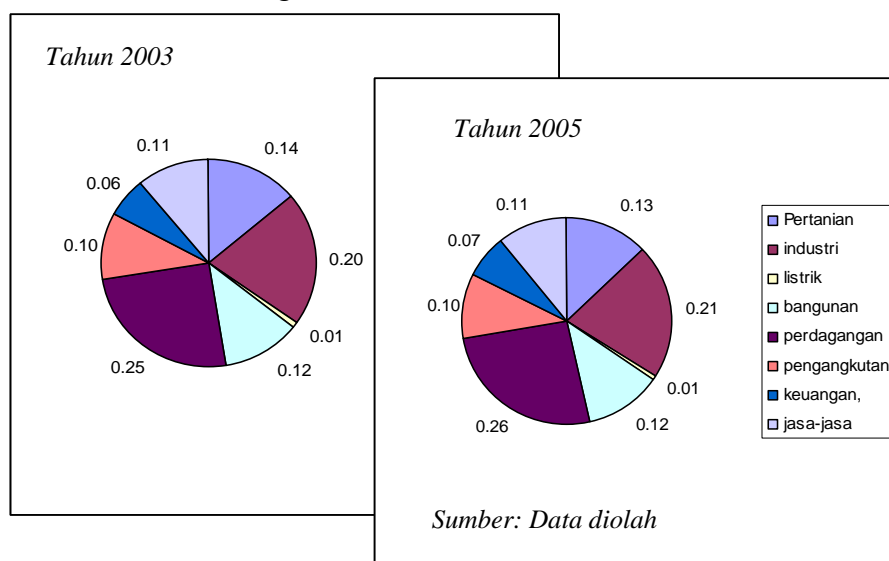
Dalam dimensi pembangunan Jawa Tengah tersebut Kota Pekalongan ditetapkan sebagai Kawasan andalan dan Kawasan strategis dengan pertumbuhan cepat. Untuk membuktikan apakah Kota Pekalongan memiliki ciri-ciri yang diharapkan sebagai kawasan andalan dan kawasan pertumbuhan cepat diperlukan identifikasi terkait dengan klasifikasi pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan dan keterkaitan ekonomi antardaerah.

5.1. Analisis Data

Dari Tabel 4.6. terlihat pada tahun 2005 PDRB Kota Pekalongan dengan perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 senilai Rp. 1,701,324.23 juta, dibanding tahun 2003 meningkat senilai Rp 126.560.59 juta atau meningkat 8.04%. Dilihat dari struktur perekonomiannya selama periode pengamatan yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan tetap mendominasi terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan dengan kontribusi masing-masing 20,46 % dan 25,18% pada tahun 2003 menjadi 20,84% dan 25,83% pada tahun 2005. Artinya bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2005 struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak mengalami pergeseran.

Guna mendukung gambaran mengenai tidak adanya pergeseran struktur ekonomi Kota Pekalongan selama periode pengamatan disajikan Gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB di Kota Pekalongan
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2003 dan 2005 (%)



Secara sektoral peranan sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Pekalongan (tanpa sektor pertambangan, karena di Kota Pekalongan tidak terdapat sektor pertambangan) selama periode pengamatan, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pekalongan selama periode pengamatan menunjukkan sifat fluktuasi. Pada tahun 2003 kontribusi sektor pertanian senilai Rp. 223, 317.30 (14%), pada 2005 meningkat menjadi Rp. 247,900.80 (15%), selanjutnya pada tahun 2005 kontribusinya menurun menjadi Rp. 22,482.00 (13%). Dilihat dari laju pertumbuhannya pada tahun 2005 sektor pertanian mengalami penurunan

yang cukup drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 11,06%. Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian disebabkan karena peranan sub sektor perikanan yang merupakan produk unggulan Kota Pekalongan mengalami penurunan, terutama sebagai dampak kebijakan kenaikan harga bahan minyak, sehingga banyak nelayan yang tidak melaut karena biaya produksi yang cukup tinggi.

b. Sektor Industri Pengolahan

Secara umum peranan sektor industri di Kota Pekalongan sangat dominan. Sektor industri adalah sektor yang menjadi kantong penyerapan tenaga kerja terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2005 tercatat tenaga kerja yang ada di sektor industri sebanyak 17.515 orang. Kontribusi sektor industri pengolahan selama periode pengamatan menunjukkan *trend* yang meningkat dengan kontribusi pada tahun 2003 senilai Rp. 322,248.05 juta (20%), pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 330,239.24 juta (20%), dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 354,605.57 juta (21%). Meskipun pada tahun 2005 ada kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak kegiatan sektor industri tidak terpengaruh secara signifikan karena sebagian besar industri di Kota Pekalongan adalah industri kecil. Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2005 mengalami laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,38%.

c. Sektor listrik, gas dan air minum

Secara umum kontribusi sektor listrik, gas, dan air minum di Kota Pekalongan dengan sub sektor listrik dan air minum sepanjang periode pengamatan menggambarkan trend yang meningkat yaitu senilai Rp. 13,921.69 juta pada tahun 2003 meningkat menjadi senilai Rp. 17,059.23 juta, pada tahun 2005 atau meningkat 22,54%. Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2005 laju pertumbuhan sektor listrik gas, dan air minum di Kota Pekalongan lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 20,83%.

d. Sektor Bangunan

Secara umum kontribusi sektor bangunan terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama periode pengamatan menggambarkan sifat fluktuasi. Pada tahun 2003 nilai kontribusi sektor bangunan senilai Rp. 183,086.25 juta (12%%), pada tahun 2004 menurun menjadi Rp. 181,261.21 juta (11%), selanjutnya pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi Rp. 199,211.60 juta (12%). Peningkatan nilai kontribusi sektor pembangunan pada tahun 2005 tersebut menggambarkan adanya peningkatan aktivitas sektor pembangunan yang cukup tinggi di Kota Pekalongan. Dilihat dari laju pertumbuhan sektor bangunan pada tahun 2005 memberi sumbangan terhadap besarnya laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tertinggi setelah sektor listrik, gas dan air minum, yaitu sebesar 9,90%. Laju pertumbuhan sebesar itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

peningkatan yang cukup drastis, karena pertumbuhan tahun 2004 adalah minus 1 %, begitu juga laju pertumbuhan tahun 2003 hanya sebesar 5.54%.

e. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Secara umum sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kota Pekalongan menggambarkan trend yang terus meningkat yaitu senilai Rp. 396,539.81 juta (25,18%) tahun 2003, menjadi senilai Rp. 418,977.18 juta (25.57%) pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp. 439,455.91 juta (25.83%). Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2005 pertumbuhan sektor ini lebih rendah dibandingkan tahun 2004 dan lebih tinggi dari tahun 2003, yaitu sebesar 4.89%. sehingga dapat dikatakan bahwa sepanjang periode pengamatan laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran bersifat fluktuasi.

f. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Secara umum kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi di Kota Pekalongan sepanjang periode pengamatan menunjukkan trend yang meningkat, yaitu senilai Rp. 163,440.66 juta (10.38%) pada tahun 2003, meningkat menjadi Rp. 166,402.36 juta (10.15%) pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi senilai Rp.174,126.33 juta (10.23%). Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2005 laju pertumbuhan sektor pengangkutan sebesar 4,64%. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan sektor ini lebih tinggi. Namun besarnya laju pertumbuhan sepanjang tahun pengamatan bersifat fluktuasi.

g. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

Secara umum kontribusi sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan di Kota Pekalongan sepanjang pengamatan memiliki trend yang meningkat yaitu senilai RP. 102,358.27 juta (6.50%) pada tahun 2003, meningkat menjadi senilai Rp. 105,390.19 juta (6.43%), dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi senilai Rp. 113,163.30 juta (6.65%). Dilihat dari laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,38%. Namun laju pertumbuhannya bersifat fluktuasi, tahun 2003 sebesar 3.34%, turun menjadi sebesar 2,96% pada tahun 2004.

h. Sektor Jasa-Jasa

Secara umum kontribusi sektor Jasa-jasa terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama periode pengamatan menggambarkan trend yang meningkat. Pada tahun 2003 nilai kontribusi sektor bangunan senilai Rp. 169,851.61 juta (10.79%), pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 174,501.90 juta (10.65%), selanjutnya pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp. 183,219.86 juta (10.77%). Dilihat dari laju pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun 2005 memberi sumbangan terhadap besarnya laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan sebesar 5 %. Dibanding tahun-tahun sebelumnya Laju pertumbuhan tahun 2005 lebih tinggi dan sepanjang periode pengamatan memiliki *trend* yang meningkat.

5.2. Klasifikasi Pertumbuhan.

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993; Hil, 1989 (Kuncoro, 2002)

Kriteria yang digunakan untuk membagi Klasifikasi Kota Pekalongan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh*, adalah jika rata-rata PDRB perkapita dan rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan lebih tinggi dari rata-rata PDRB perkapita dan rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah
2. *Daerah Maju Tapi Tertekan*, jika rata-rata PDRB perkapita Kota Pekalongan lebih tinggi dari rata-rata PDRB Perkapita Jawa Tengah, dan pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan lebih rendah rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah.

3. *Daerah Berkembang* adalah jika rata-rata PDRB Perkapita Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata PDRB perkapita Jawa Tengah, dan pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah, .
4. *Daerah Relatif Tertinggal*, adalah jika rata-rata PDRB dan rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata PDRB perkaapita dan rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah.

Perkembangan PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB, serta nilai rata-rata PDRB perkapita dan rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 ditunjukkan pada Tabel 5.1. dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan pertahun sebesar 3.92% dan Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 4.89%, sementara PDRB Perkapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 5,913,911.50, dan PDRB Perkapita Jawa Tengah sebesar Rp. 3,896,345.47.

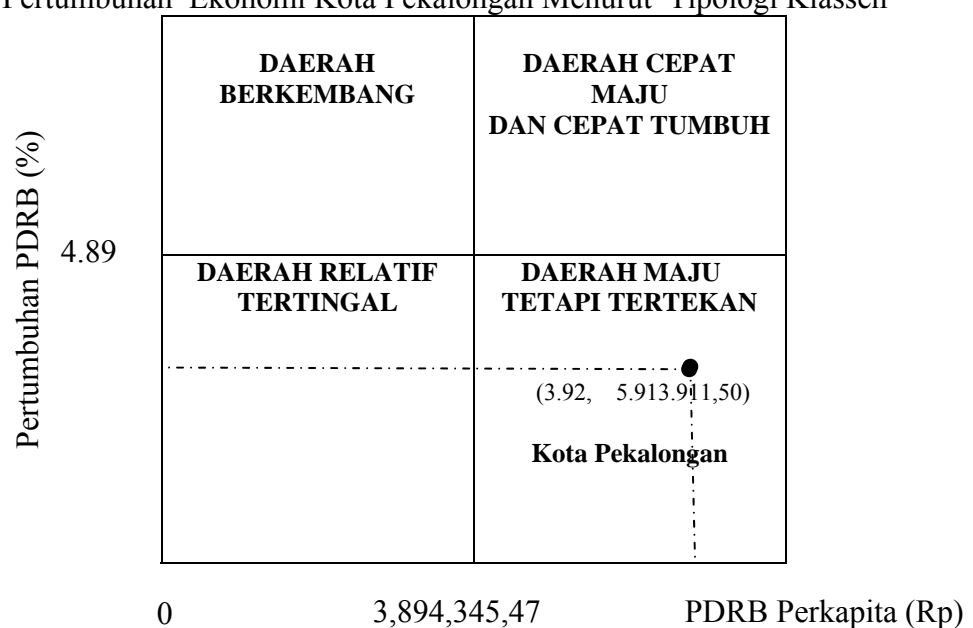
Tabel. 5.1
PDRB Perkapita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2003-2005

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
2003	5,785,148.27	3,753,758.59	3.86	4.76
2004	5,967,357.58	3,893,239.89	4.07	4.90
2005	5,989,228.64	4,042,037.92	3.82	5.00
Rata-rata	5,913,911.50	3,896,345.47	3.92	4.89

Sumber: data diolah

Kondisi rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan yang lebih rendah dari pertumbuhan Jawa Tengah, dan rata-rata PDRB perkapita Kota Pekalongan yang lebih tinggi dari Jawa Tengah ini menurut analisis tipologi Klassen Kota Pekalongan termasuk dalam katagori daerah *Maju Tapi Tertekan*. ini tercermin dari nilai rata-rata PDRB perkapita Kota Pekalongan yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB Perkapita Jawa Tengah, namun demikian tingkat pertumbuhan PDRBnya masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Keadaan tersebut menunjukkan posisi Kota Pekalongan sebagai kawasan andalan belum menunjukkan fungsinya atau kurang memenuhi kriteria yang diharapkan sebagai kawasan andalan di Jawa Tengah. Untuk menggambarkan posisi Kota Pekalongan menurut analisis tipologi Klassen digunakan diaram Kartesius. Dimana sumbu vertikal menjelaskan rata-rata PDRB perkapita Jawa Tengah dan sumbu horosontal menjelaskan rata-rata pertumbuhan PDRB Jawa Tengah (lihat Gambar 5.2)

Gambar 5.2
Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Menurut Tipologi Klassen



Kota Pekalongan sebagai daerah yang berada klasifikasi daerah maju tapi tertekan, pada dasarnya memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, hanya saja sejak penetapan Kota Pekalongan sebagai kawasan andalan pada tahun 2003 justru kinerja perekonomian Kota Pekalongan mengalami tekanan yang relatif besar. Pada tahun 2004 dapat dikatakan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi mengalami penurunan, kecuali sektor pertanian mengalami pertumbuhan 11,%. Dari kontribusi sektor pertanian ini laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan mencapai 4.07%. namun memasuki tahun 2005 kembali perekonomian Kota Pekalongan mendapat tekanan dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Rentannya sektor penyangga perekonomian Kota Pekalongan terhadap kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan merosot dari 4.07 % pada tahun 2004 menjadi 3.82% pada tahun 2005. Sektor –sektor yang mengalami tekanan akibat kebijakan pemerintah tersebut adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Akibat kebijakan tersebut sektor pertanian mensuplai laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan hingga minus 11,06%. Merosotnya laju pertumbuhan sektor pertanian terutama didorong oleh merosotnya peranan subsektor bahan makanan dan subsektor perikanan yang menjadi unggulan bagi Kota Pekalongan masing-masing hingga minus 19,71% dan 11,09%. Sub-sub sektor perdagangan yang terdiri dari perdagangan besar/ kecil, sektor perhotelan, dan sektor restoran seluruhnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

Ketertekanan ekonomi Kota Pekalongan tercermin dari masih tingginya indikator makro ekonomi lainnya seperti angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta tingkat inflasi. Kinerja ekonomi Kota Pekalongan masih terbebani jumlah pengangguran yang tinggi. Tahun 2003 terdapat jumlah pengangguran sebesar 20,355 orang, pada tahun 2004 meningkat menjadi 22.696 orang, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 23.305. atau rata-rata pengangguran pertahun selama periode pengamatan sebesar 12.46%. tingginya angka pengangguran di Kota Pekalongan karena daya serap lapangan usaha di Kota Pekalongan relatif kecil dibanding dengan jumlah pencari kerja tiap tahunnya.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 mencapai 29.19% kenaikan yang tajam ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah mengenai pengucuran dana Bantuan Tunai Langsung atau BLT. Demikian juga laju inflasi selama periode pengamatan menunjukkan peningkatan suhu dari 4.55% pada tahun 2003, menjadi 5,41 pada tahun 2004, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2005 menjadi 16.05%. kenaikan yang tinggi pada tahun 2005 tidak terlepas dari kebijakan pemotongan subsidi BBM yang mendorong kenaikan tarif transportasi dan bahan makanan.

5.3. Sektor –Sektor Unggulan.

Kota Pekalongan mempunyai potensi perekonomian yang memiliki keunggulan komparatif yang perlu dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan daerah. Guna mengidentifikasi sektor unggulan digunakan analisis

Location Quotient (LQ) dan Analisis Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), analisis Overlay, dan *Shift Share*.

5.3.1. Analisis Location Quotient

Analisis LQ digunakan untuk menentukan subsektor unggulan perekonomian daerah yang mengacu pada formulasi Bendavid-Val (1991: 74 dalam Mudrajad Kuncoro, Tahun 2002). Kriteria pengukuran LQ menurut Bendavid-Val yaitu: $LQ > 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama di tingkat nasional. Bila $LQ < 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu ditingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional, dan bila $LQ = 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat nasional. Bila nilai $LQ > 1$ berarti subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ berarti subsektor tersebut bukan merupakan sub sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian.

Dalam penelitian ini LQ dihitung atas dasar nilai sektoral dalam PDRB Kota Pekalongan sebagai wilayah studi dan nilai sektoral dalam PDRB Jawa Tengah sebagai wilayah referensi dari tahun 2003-2005.

Hasil Analisis LQ pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa rata-rata LQ dari 9 sektor minus sektor pertambangan selama periode pengamatan hanya ada dua sektor yang nilai LQ nya lebih rendah di bawah satu (< 1), yaitu sektor pertanian

dan sektor industri, dengan nilai koefisien LQ rata-rata sebesar 0.66 untuk sektor pertanian, dan sebesar 0.63 untuk sektor industri. Artinya menurut analisis Bendavid-Val bahwa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan bukan sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Pekalongan. Sedangkan 6 sektor lainnya yang memiliki nilai koefisien LQ rata-rata lebih dari satu (>1) adalah sektor listrik, gas dan air minum (2,14), sektor bangunan (2,07), sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi (2,10), sektor keuangan, persewaan dan jasa (1,81), dan sektor jasa (1,06). Artinya keenam sektor tersebut adalah sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Pekalongan.

Dari Tabel 5.2. yang menarik untuk dicermati adalah bahwa hasil perhitungan LQ selama periode pengamatan, baik sektor pertanian dan sektor industri tidak pernah memiliki nilai koefisien lebih dari satu (<1), sebaliknya sektor-sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran,, sektor pengangkutan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa memiliki nilai koefisien lebih dari satu (>1). Melihat banyaknya sektor unggulan berdasarkan perhitungan LQ ini, penetapan Kota Pekalongan sebagai kawasan andalan dipandang tepat.

Dilihat dari perkembangan sektor-sektor yang memiliki nilai koefisien LQ lebih dari satu (>1) sepanjang periode pengamatan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok: pertama, kelompok sektor yang memiliki nilai LQ yang cenderung meningkat yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor keuangan,

berarti dua sektor tersebut memiliki kecenderungan yang semakin kuat tingkat spesialisasinya dari sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kelompok sektor yang memiliki LQ yang menurun, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, artinya bahwa sektor tersebut memiliki kecenderungan yang semakin melemah tingkat spesialisasinya dari sektor yang sama di Jawa Tengah. Ketiga adalah kelompok sektor yang memiliki LQ yang perkembangannya berfluktuatif yaitu sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa.

Tabel 5.2
LQ Rata-rata Kota Pekalongan Tahun 2003-2005

No	Sektor	Koefisien LQ			LQ Rata-rata
		2003	2004	2005	
1	Pertanian	0.66	0.71	0.61	0.66
2	Pertambangan	-	-	-	-
3	Industri	0.63	0.62	0.64	0.63
4	Listrik	7.49	1.09	1.20	2.14
5	Bangunan	2.14	2.00	2.08	2.07
6	Perdagangan	1.16	1.21	1.22	1.20
7	Pengangkutan	2.12	2.10	2.07	2.10
8	Keuangan	1.78	1.79	1.86	1.81
9	Jasa-jasa	1.06	1.05	1.07	1.06

Sumber: lampiran 3,4,dan 5

Dalam analisis ini dapat dikatakan terhadap sektor yang memiliki LQ lebih dari satu (>1) dan memiliki perkembangan yang meningkat seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Terhadap sektor-sektor tersebut memungkinkan dilakukan spesialisasi produksi untuk membuka peluang pertukaran dengan daerah sekitar Kota Pekalongan. Peran Pemerintah Kota Pekalongan untuk memberdayakan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebagai penggerak perekonomian sangat diperlukan, terutama dalam

proses pertukaran dengan komoditas antardaerah yang mendorong masuknya pendapatan dari luar ke Kota Pekalongan.

5.3.2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi analisis *Location Quotient* (LQ) guna menentukan sektor unggulan. Pada dasarnya alat analisis ini sama dengan alat analisis LQ, letak perbedaannya terletak pada kriteria penghitungannya. Analisis LQ menggunakan kriteria distribusi, sedangkan Model Rasio Pertumbuhan menggunakan kriteria pertumbuhan. Identifikasi sektor unggulan dilakukan dengan memberikan notasi positif (+) dan notasi negatif (-). Notasi positif (+) diberikan untuk koefisien komponen yang lebih dari satu.

Tabel 5.3
Koefisien MRP PDRB Kota Pekalongan tahun 2003-2005

Sektor		R _{Pr}		R _{Ps}	
		Riil	Notasi	Riil	Notasi
1	Pertanian	0.90	-	-0.14	-
2	Pertambangan	-	-	-	-
3	Industri	1.00	+	0.88	-
4	Listrik	8.49	+	0.21	-
5	Bangunan	1.29	+	0.61	-
6	Perdagangan	0.77	-	1.23	+
7	Pengangkutan	1.07	+	0.56	-
8	Keuangan	0.80	-	1.16	+
9	Jasa-Jasa	0.93	-	0.76	-

Sumber: Lampiran 6

Hasil perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (Lihat Tabel 5.3) memperlihatkan bahwa di Kota Pekalongan tidak terdapat sektor yang memenuhi kriteria pertama, yaitu baik R_{Pr} dan R_{Ps} yang keduanya bernilai positif, berarti di Kota Pekalongan tidak terdapat

kegiatan sektor yang benar-benar menonjol tingkat pertumbuhannya baik di tingkat Kota Pekalongan maupun di tingkat Jawa Tengah. Kegiatan sektor yang tingkat pertumbuhannya memenuhi kriteria kedua atau sektor yang mempunyai RPR yang negatif (-) dan nilai RPs positif (+), berarti pada tingkat Jawa Tengah sektor tersebut mempunyai pertumbuhan kurang menonjol namun pada tingkat Kota Pekalongan menonjol adalah sektor perdagangan dan sektor keuangan. Kegiatan sektor yang tingkat pertumbuhannya memenuhi kriteria ketiga atau sektor yang mempunyai nilai RPR positif (+) dan RPs negatif (-), berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat Jawa Tengah menonjol namun pada tingkat kota kurang menonjol, adalah sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan kegiatan sektor yang tingkat pertumbuhannya memenuhi kriteria keempat atau sektor yang mempunyai RPR dan RPs yang negatif (-) adalah sektor pertanian dan sektor industri, yang berarti kegiatan kedua sektor tersebut pada tingkat Jawa Tengah maupun tingkat Kota Pekalongan mempunyai pertumbuhan kurang menonjol.

5.3.3. Analisis Overlay

Pendekatan overlay pada dasarnya merupakan penggabungan analisis *Location Quotient* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) baik Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPR) maupun Rasio Pertumbuhan wilayah studi (RPs). Penggabungan kedua alat analisis ini untuk memperoleh hasil identifikasi kegiatan sektoral yang unggul, baik dari sisi kontribusinya maupun sisi pertumbuhannya. Identifikasi kegiatan unggulan ditunjukkan melalui overlay antara RPR, RPs dan LQ. Koefisien dari ketiga komponen tersebut kemudian

disamakan satuannya dengan memberikan notasi positif (+) dan notasi negatif (-). Notasi positif (+) diberikan untuk koefisien komponen yang lebih besar dari satu.

Identifikasi sektor unggulan dari hasil overlay dibedakan dalam tiga kriteria sebagai berikut:

1. Hasil overlay yang menunjukkan baik RPR , RPs dan LQ ketiganya bertanda Positif, berarti kegiatan sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang tinggi di tingkat Jawa Tengah mapupun di tingkat Kota Pekalongan dan kontribusi sektoral Kota Pekalongan lebih lebih tinggi dari Jawa Tengah. Artinya sektor tersebut mempunyai potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama di tingkat Jawa Tengah.
2. Hasil overlay yang menunjukkan RPs dan LQ yang bernilai positif, berarti kegiatan sektoral di Kota Pekalongan lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan setoral yang sama di tingkat Jawa Tengah, baik sisi pertumbuhannya maupun kontribusinya. Dengan kata lain sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi Kota Pekalongan di Jawa Tengah.
3. Hasil overlay menunjukkan baik RPR , RPs dan LQ ketiganya bertanda negatif, berarti kegiatan sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah di tingkat Jawa Tengah maupun di Kota Pekalongan dan kontribusi sektoral di Kota Pekalongan lebih rendah dari Jawa Tengah. Artinya sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif ysng lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Jawa Tengah.

Tabel 5.4
Analisis Overlay PDRB Kota Pekalongan

Sektor		RPR		RPs		LQ		Overlay Notasi
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	
1	Pertanian	0.90	-	-0.14	-	0.66	-	---
2	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri	1.00	+	0.88	-	0.63	-	+-
4	Listrik	8.49	+	0.21	-	2.14	+	+-
5	Bangunan	1.29	+	0.61	-	2.07	+	+-
6	Perdagangan	0.77	-	1.23	+	1.20	+	-++
7	Pengangkutan	1.07	+	0.56	-	2.10	+	+-
8	Keuangan	0.80	-	1.16	+	1.81	+	-++
9	Jasa-Jasa	0.93	-	0.76	-	1.06	+	--+

Sumber: Data diolah

Hasil analisis Overlay menunjukkan bahwa selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (lihat Tabel 5.4) di Kota Pekalongan tidak terdapat kegiatan sektoral yang memenuhi kriteria pertama. Yaitu baik RPR, RPs dan LQ yang bernilai positif. Hasil ini berarti di Kota Pekalongan tidak terdapat kegiatan sektoral yang mempunyai pertumbuhan dan kontribusi yang lebih tinggi di tingkat Jawa Tengah. Artinya sektor-sektor yang ada di Kota Pekalongan tidak mempunyai potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama di tingkat Jawa Tengah .

Hasil analisis Overlay menunjukkan bahwa kegiatan sektoral di Kota Pekalongan yang memenuhi kriteria kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Artinya kegiatan sektor perdagangan, hotel, dan jasa perusahaan di Kota Pekalongan lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan setoral yang sama di tingkat Jawa Tengah, baik sisi pertumbuhannya maupun kontribusinya. Dengan kata lain sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi Kota Pekalongan di Jawa Tengah.

Hasil overlay yang menunjukkan kegiatan sektoral yang memenuhi kriteria ketiga adalah sektor pertanian, berarti kegiatan sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah di tingkat Jawa Tengah, pertumbuhan sektoral di Kota Pekalongan lebih rendah dari pertumbuhan sektoral di Jawa Tengah dan kontribusi sektoral di Kota Pekalongan lebih rendah dari Jawa Tengah. Artinya sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Jawa Tengah.

5.3.4. Analisis Shift Share.

Analisis *shift share* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang di Kota Pekalongan dibanding dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah dan analisis ini akan memperlihatkan kinerja (*performance*) sektor-sektor di Kota Pekalongan dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Jawa Tengah. Hasilnya secara keseluruhan yang diharapkan adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perubahan PDRB daerah Kota Pekalongan.

Penggunaan Analisis *shift share* dalam penelitian ini bertujuan melengkapi analisis LQ, karena dalam metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan. Metode *shift share* dimaksudkan untuk memberikan secara rinci penyebab perubahan atas beberapa variabel.

Hasil analisis Analisis Shift Share Estaban Marquiles (lihat Tabel 5.5) menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama tahun 2003-2005, membawa pengaruh positif bagi PDRB Kota Pekalongan yang

ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota Pekalongan sebesar senilai Rp.39.109,05 juta atau 30,89%. Peningkatan ini terjadi pada semua sektor dengan peningkatan terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp. 25.587,59 juta, dan terkecil pada sektor listrik, gas dan air minum sebesar Rp. 139,22 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa komponen pertumbuhan PDRB Jawa Tengah cukup memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PDRB Kota Pekalongan.

Tabel 5.5
Analisis Shift Share Estaban Marquiles Kota Pekalongan Tahun 2003 - 2005

No	Sektor	Pengaruh Pertumbuhan Jawa Tengah (juta)	Pengaruh Bauran Industri (juta)	Pengaruh Keunggulan Kompetitif (juta)	Pengaruh Kompetitif (juta)	Perubahan Daerah (juta)
1	Pertanian	25,587.59	-2,834.12	-38,573.00	12,984.68	-2,834.86
2	Pertambangan	0	0	0	0	0
3	Industri	3,222.48	33,864.18	-7,521.60	2,792.46	32,357.52
4	Listrik	139.22	95,538.18	-12,348.51	-80,191.34	3,137.54
5	Bangunan	1,830.86	26,098.86	-5,520.33	-6,284.05	16,125.35
6	Perdagangan	3,965.40	30,297.18	7,483.98	1,169.54	42,916.10
7	Pengangkutan	1,634.41	18,559.51	-4,485.37	-5,022.88	10,685.67
8	Keuangan	1,023.58	8,149.63	919.09	712.74	10,805.03
9	Jasa-jasa	1,698.52	16,298.06	-4,371.32	-257.01	13,368.25
		39,102.05	225,971.48	-64,417.07	-74,095.86	126,560.60

Sumber: Lampiran 7

Demikian juga komponen pengaruh bauran industri (*industry mix*) Kota Pekalongan memberi pengaruh yang sangat berarti terhadap peningkatan PDRB Kota Pekalongan. Hal ini tercermin dari pengaruh bauran industri yang positif bagi PDRB Kota Pekalongan sebesar Rp. 225.971,48 juta. Peningkatan ini terjadi pada semua sektor kecuali sektor pertanian mengalami penurunan sebesar Rp. 2.384,12 juta.

Sebaliknya komponen pengaruh keunggulan kompetitif dan pengaruh kompetitif selama tahun 2003-2005 memberi pengaruh negatif bagi PDRB Kota

Pekalongan, masing-masing sebesar Rp. 64.417,07 juta dan Rp. 74.095,86 juta. Penurunan ini terjadi pada semua sektor kecuali sektor perdagangan dan sektor keuangan, Hotel, dan restoran. Hal ini mengidentifikasi bahwa kedua sektor tersebut adalah sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding sektor yang sama di Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah.

Dilihat dari efek alokasi (*allocation effect*)nya (lihat Tabel 5.6) di Kota Pekalongan terdapat banyak sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Namun demikian jika dicermati di Kota Pekalongan sepanjang periode pengamatan hanya ada dua sektor memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Hal ini bermakna bahwa kedua sektor adalah sektor yang memiliki kompetitif dan spesialisasi. Hasil *shift share* yang dilakukan tidak bertentangan dengan hasil overlay yang telah dilakukan.

Tabel 5.6
Efek alokasi Kota Pekalongan

No.	Sektor	(Eij -E'ij)	(rij -rin)	Efek Lokasi
1	Pertanian	-113,321.32 < 0	-0.11 < 0	Tidak punya keunggulan kompetitif, tidak spesialisasi
2	Pertambangan	- -	- -	-
3	Industri	-190,280.93 < 0	-0.01 < 0	Tidak punya keunggulan kompetitif, tidak spesialisasi
4	Listrik	12,063.98 > 0	-6.65 < 0	Punya keunggulan kompetitif, tidak spesialisasi
5	Bangunan	97,465.74 > 0	-0.06 < 0	Punya keunggulan kompetitif, tidak spesialisasi
6	Perdagangan	53,593.29 > 0	0.02 > 0	Punya keunggulan kompetitif, spesialisasi
7	Pengangkutan	86,340.09 > 0	-0.06 < 0	Punya keunggulan kompetitif, tidak spesialisasi
8	Keuangan	44,707.38 > 0	0.02 > 0	Punya keunggulan kompetitif, spesialisasi
9	Jasa-Jasa	9,431.78 > 0	-0.03 < 0	Punya keunggulan kompetitif, tidak spesialisasi

Sumber: Lampiran 7

Mencermati hasil perhitungan alat-alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dapat dijelaskan bahwa di Kota Pekalongan terdapat banyak sektor unggulan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan maupun daerah sekitarnya, yaitu listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Namun demikian baik hasil overlay maupun hasil shift share memperoleh gambaran yang sama yaitu sektor-sektor yang benar-benar memiliki potensi paling menonjol untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan hanya sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Masuknya sektor perdagangan, sektor keuangan ke dalam sektor unggulan sangatlah relevan dengan peran kedua sektor tersebut dalam membentuk

PDRB Kota Pekalongan begitu dominan terutama sektor perdagangan yang mencapai 21%. Selain itu peran sektor perdagangan juga penting dalam penyerapan tenaga kerja, yang selama periode pengamatan banyak menyerap tenaga kerja terbanyak setelah sektor industri. Sektor perdagangan juga menjadi ciri dari semangat kewirausahaan masyarakat kota pekalongan yang sebagian dari perniagaannya sebagai pengusaha batik. Kegiatan sektor perdagangan juga tercermin dari banyaknya sentra-sentra perbelanjaan yang meliputi pasar tradisional, pasar modern, dan sentra-sentara grosir, serta sentra perbelanjaan lain. Pasar tradisional tercatat ada empat pasar tradisional yang besar yaitu Pasar Banjarsari, Pasar Anyar, Pasar Banyurip, dan Pasar Klego. Pasar Swalayan atau pasar modern terdapat empat pasar modern yang dilengkapi area bermain yaitu Pasar Swalayan Sri Ratu, Pasar Swalayan Matahari, Pasar Swalayan Borobudur, dan Pasar Swalayan Mega Center. Secara keseluruhan sentra – sentra perbelanjaan di Kota Pekalongan pada tahun 2005 adalah 10 pasar dengan pedagang sebanyak 5.842 pedagang, yang terdiri dari 242 pedagang toko dan 3.417 pedagang los, 1.541 pedagang kios, dan 642 pedagang eceran (Kota Pekalongan Dalam Angka, 2005).

Sektor keuangan menjadi sektor unggulan sangat relevan mengingat perkembangan kegiatan sektor tersebut di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan terdapat berbagai lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank seperti BCA Bank, LIPPO Bank, BII Bank, Bank BRI, Bank Muamalat Indonesia, BPD, dan lain-

lain. Sementara lembaga keuangan bukan bank tercatat ada Bumi Putra, Asuransi Jiwa, dan lain-lain.

Sektor industri yang menjadi kantong penyerap tenaga kerja terbanyak bukan merupakan sektor unggulan hal ini dimungkinkan karena jumlah industri yang di Kota Pekalongan sebagian besar adalah industri kecil dengan jumlah 3.556 buah. Sementara industri besar hanya terdapat 3 buah dan 50 buah industri menengah. Hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan sektor industri menjadi rendah dibanding dengan pertumbuhan wilayah Jawa Tengah.

Menurut Robinson Tarigan (2004), terdapat sejumlah faktor yang bisa membuat suatu daerah memiliki keunggulan komparatif (*competitive advantage*), dapat berupa kondisi alam, yaitu suatu yang sudah given tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia. Menurutny bahwa suatu wilayah dapat memiliki keunggulan komparatif karena salah satu faktor atau gabungan dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pemberian alam, yaitu kondisi alam akhirnya wilayah memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.
2. Masyarakat menguasai teknologi mutakhir untuk jenis produk tertentu.
3. Masyarakatnya menguasai ketrampilan khusus
4. Wilayah itu dekat dengan pasar
5. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi, seperti adanya sarana perhubungan baik darat, laut maupun udara.
6. Mempunyai daerah konsentrasi/ sentra dari suatu kegiatan sejenis. Seperti sentra produksi, sentra perdagangan. Dimana daerah konsentrasi/ sentra bisa

menjamin kepastian adanya barang dalam kualitas dan kuantitas yang diinginkan dan bisa menurunkan biaya pemasaran/biaya transportasi.

7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan, yaitu memanfaatkan keuntungan aglomerasi, yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran.
8. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung ketrampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung.
9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan: jujur, terbuka, mau bekerja keras, dan disiplin sehingga lingkungan aman, tertib, dan teratur. Kondisi seperti ini akan menjamin kelangsungan investasi, biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah dan efisien.
10. Kebijakan pemerintah, antara lain dengan menciptakan salah satu/ beberapa faktor yang menciptakan keunggulan seperti yang disebutkan diatas.

Maka berpijak pada pemikiran Robinson Tarigan diatas, banyaknya sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di Kota Pekalongan tidak terlepas dari faktor –faktor seperti: (1) penguasaan teknologi mutakhir untuk jenis produk tertentu, (2) penguasaan ketrampilan khusus, (3) kedekatan dengan pasar, (4) aksesibilitas yang tinggi, yaitu terdapat jaringan transportasi yang memudahkan mobilitas penduduk memasuki Kota Pekalongan (4) terdapat sentra-sentra produksi, dan sentra perdagangan khususnya grosir, (5) kebijakan pemerintah, dan (6) mentalitas masyarakat Kota Pekalongan.

5.4. Analisis Gravitasi

Pusat-pusat yang pada umumnya merupakan kota-kota besar tidak hanya berkembang sangat pesat, akan tetapi mereka bertindak sebagai pompa-pompa pengisap dan memiliki daya penarik yang kuat bagi wilayah-wilayah belakangnya yang relatif statis. Wilayah-wilayah pinggiran di sekitar pusat secara berangsur-angsur berkembang menjadi masyarakat dinamis. Terdapat arus penduduk, modal, dan sumberdaya ke luar wilayah belakang yang dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan pusat-pusat dimana pertumbuhan ekonominya sangat cepat dan bersifat kumulatif. Sebagai akibatnya, perbedaan pendapatan antara pusat dan wilayah pinggiran cenderung lebih besar.

Hakekat pembangunan regional adalah memandang pusat kota sebagai tempat sentral bagi titik pertumbuhan dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan daerah. Dengan demikian terjadi interdependensi antara pusat kota dengan daerah-daerah disekitarnya. Kota Pekalongan dalam dimensi pembangunan Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai kawasan andalan dan kawasan pertumbuhan cepat yang diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi Kota Pekalongan dan daerah-daerah sekitarnya, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang. Untuk keperluan identifikasi keterkaitan antarkota, dalam penelitian ini cakupan kota yang di tuju di perluas sampai batas eks Karesidenan Pekalongan, tujuan ini dimaksudkan untuk mencari peluang pengembangan kerjasama antarkota/ kabupaten yang lebih luas.

Pada tabel 5.7 ditunjukkan jarak Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten lain. Kota/ kabupaten lain yang memiliki jarak terdekat adalah Kabupaten Batang dan

Kabupaten Pekalongan. Dua daerah ini memang langsung berbatasan dengan Kota Pekalongan. Kabupaten Batang berbatasan di sebelah timur dan selatan, dan Kabupaten Pekalongan (Kajen) berbatasan disebelah barat dan selatan. Untuk memperjelas lokasi Kota Pekalongan dengan kota/ kabupaten lain disajikan Peta Kebijakan Wilayah Pembagunan Jawa Tengah (lihat Lampiran 9) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Pekalongan. Sedangkan untuk melihat jauh dekatnya jarak Kota Pekalongan dengan kota/ kabupaten lain Se Eks Karesidenan Pekalongan Gambar. 5.3

Tabel 5.7
Indeks Gravitasi dan Model Interaksi Ruang
Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan 2003-2005

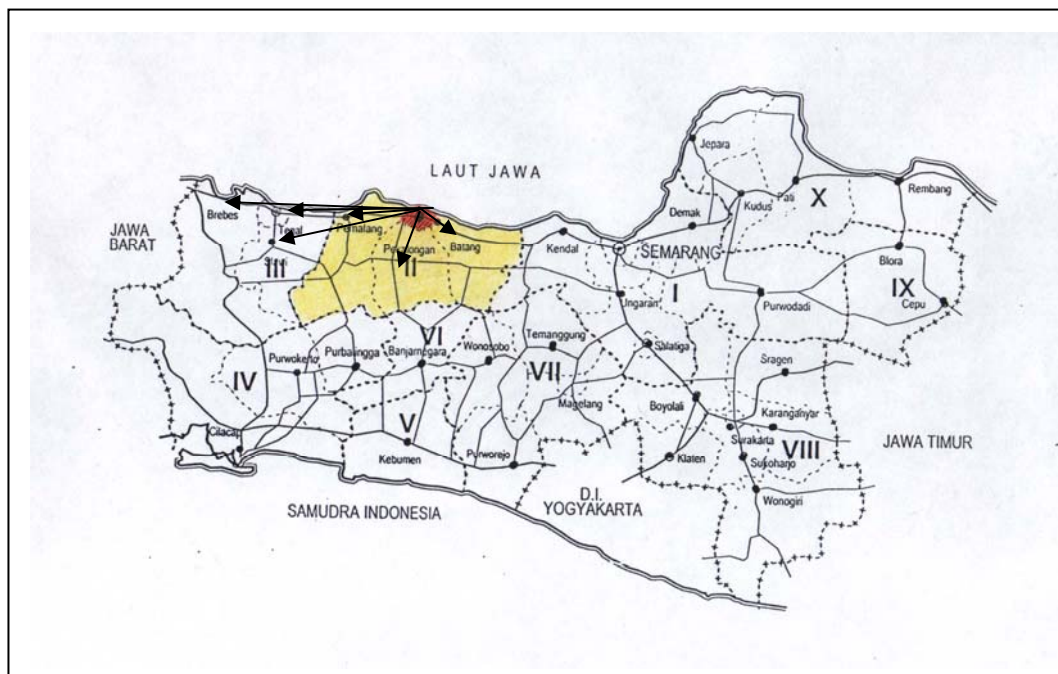
No	Kota	Jarak Dari Kota Pekalongan (Km)	Nilai indeks Gravitasi		
			Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005
1	Kabupaten Pekalongan (Kajen)	28	4,671,615,115.17	5,030,317,462.83	5,288,670,742.74
2	Kabupaten Batang	8	44,901,183,265.56	47,403,126,021.15	49,398,389,534.40
3	Kabupaten Pemasang	35	3,190,052,941.71	3,219,403,176.21	3,384,749,275.35
4	Kabupaten Brebes	78	987,492,878.89	1,070,449,250.05	1,137,444,597.31
5	Kota Tegal	65	326,842,828.23	357,814,792.44	380,374,976.96
6	Kabupaten Tegal (Slawi)	80	951,752,800.96	1,043,465,089.31	1,135,242,395.29

Sumber: Lampiran 8

Hasil perhitungan Model Gravitasi (lihat Tabel 5.7.) menunjukkan nilai indeks gravitasi selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2003 -2005 nilai indeks gravitasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan menunjukkan nilai gravitasi tertinggi dan memiliki kecenderungan yang meningkat. Tingginya nilai indeks gravitasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan adalah dua

daerah yang memiliki keeratan hubungan dengan Kota Pekalongan dibanding dengan Kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Pekalongan karena Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan adalah dua daerah yang langsung berbatasan dengan Kota Pekalongan (lihat Gambar 5.3). Sedangkan nilai indeks yang semakin naik menunjukkan bahwa keeratan hubungan kedua daerah semakin meningkat. Keeratan hubungan antarkota Pekalongan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan sangat relevan karena memang kedua daerah tersebut berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan. Keeratan ini juga diperlihatkan adanya mobilitas sumber-sumber ekonomi seperti arus tenaga kerja kedua daerah ke Kota Pekalongan atau sebaliknya.

Gambar 5.3. Peta Jarak Kota Pekalongan dengan Kota/ Kabupaten Lain Se Eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: RUTRK dan RDTRK Kota Pekalongan, 2003

Bagi daerah-daerah di sekitarnya Kota Pekalongan memiliki daya tarik tersendiri dengan adanya berbagai fasilitas yang ada di Kota Pekalongan seperti

menyangkut jasa pelayanan seperti jasa pendidikan, jasa keuangan dan jasa kesehatan serta fasilitas-fasilitas lain seperti sentra-sentra atau pusat-pusat perbelanjaan. Dimana jasa atau fasilitas-fasilitas tersebut masih menjadi rujukan karena skala produksi maupun aspek teknologinya yang lebih baik dibanding dari daerah-daerah sekitarnya. Jasa dan fasilitas-fasilitas yang ada memberi dorongan bagi pergerakan penduduk dan sumber-sumber ekonomi lain ke Kota Pekalongan. Lampiran 11 Gambar 1 dan 2 menunjukkan salah satu sentra perbelanjaan di Kota Pekalongan, yaitu Sentra Perbelanjaan Grosir Setono.

Selain itu pergerakan penduduk atau sumber-sumber ekonomi lain juga dimungkinkan karena faktor adanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kemudahan transportasi dan jarak yang relatif dekat. Lampiran 12 Gambar 3-6 memperlihatkan jenis transportasi yang lazim digunakan penduduk Kabupaten Batang untuk bepergian ke Kota Pekalongan. Lampiran 13 Gambar 7-10 memperlihatkan kendaraan yang lazim digunakan penduduk Kabupaten Pekalongan ke Kota Pekalongan. Lampiran 14 Gambar 11 dan 12 memperlihatkan suasana mobilitas tenaga kerja di pagi hari dari Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan ke Kota Pekalongan.

Dengan demikian untuk memacu perkembangan di kedua daerah perlu menganggap Kota Pekalongan sebagai daerah pusat pembangunan yang berpotensi untuk dikembangkan. Yang selanjutnya pembangunan ini akan memberikan *spread effect* terhadap perkembangan kedua daerah. Namun demikian, interaksi ini tidak boleh mengabaikan potensi-potensi yang ada di daerah Pemalang, Tegal, Slawi, dan Brebes. Terutama dengan Kabupaten

Pemalang yang nilai indeksnya di bawah Kajan. Indeks Gravitasi dengan Pemalang juga terus meningkat sepanjang pengamatan. Hal ini membuktikan keeratan hubungan yang semakin tinggi. Interaksi dengan Kabupaten Pemalang juga memiliki nilai interaksi dengan Kota Pekalongan. Faktor yang akan mendorong hubungan ini karena dukungan transportasi yang memadai diantara Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Kondisi ini akan memudahkan mobilitas sumber-sumber ekonomi bergerak diantara Kota Pekalongan-Kabupaten Pemalang.

5.5. Pembuktian Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis awal yang yang digunakan adalah Kota Pekalongan belum siap menjadi Kawasan Andalan.

Konsep Kawasan Andalan menurut Royat (Kuncoro, 2002) merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang **cepat tumbuh** dibanding lokasi lainnya dalam suatu provinsi, memiliki **sektor unggulan** dan memiliki **keterkaitan ekonomi** daerah sekitar (*hinterland*).

Dari studi yang dilakukan selama periode pengamatan, yaitu selama tahun 2003-2005 Kota Pekalongan termasuk dalam katagori *Daerah Maju Tetapi Tertekan*, memiliki sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan sektor keuangan, dan memiliki keterkaitan ekonomi yang erat dengan daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Secara lengkap dijelaskan dalam Gambar 5.4. Adapun Tabel 5.8 menunjukkan perbandingan hasil studi yang telah dilakukan dengan kriteria kawasan andalan secara teori. secara teoriterbukti ditetapkannya

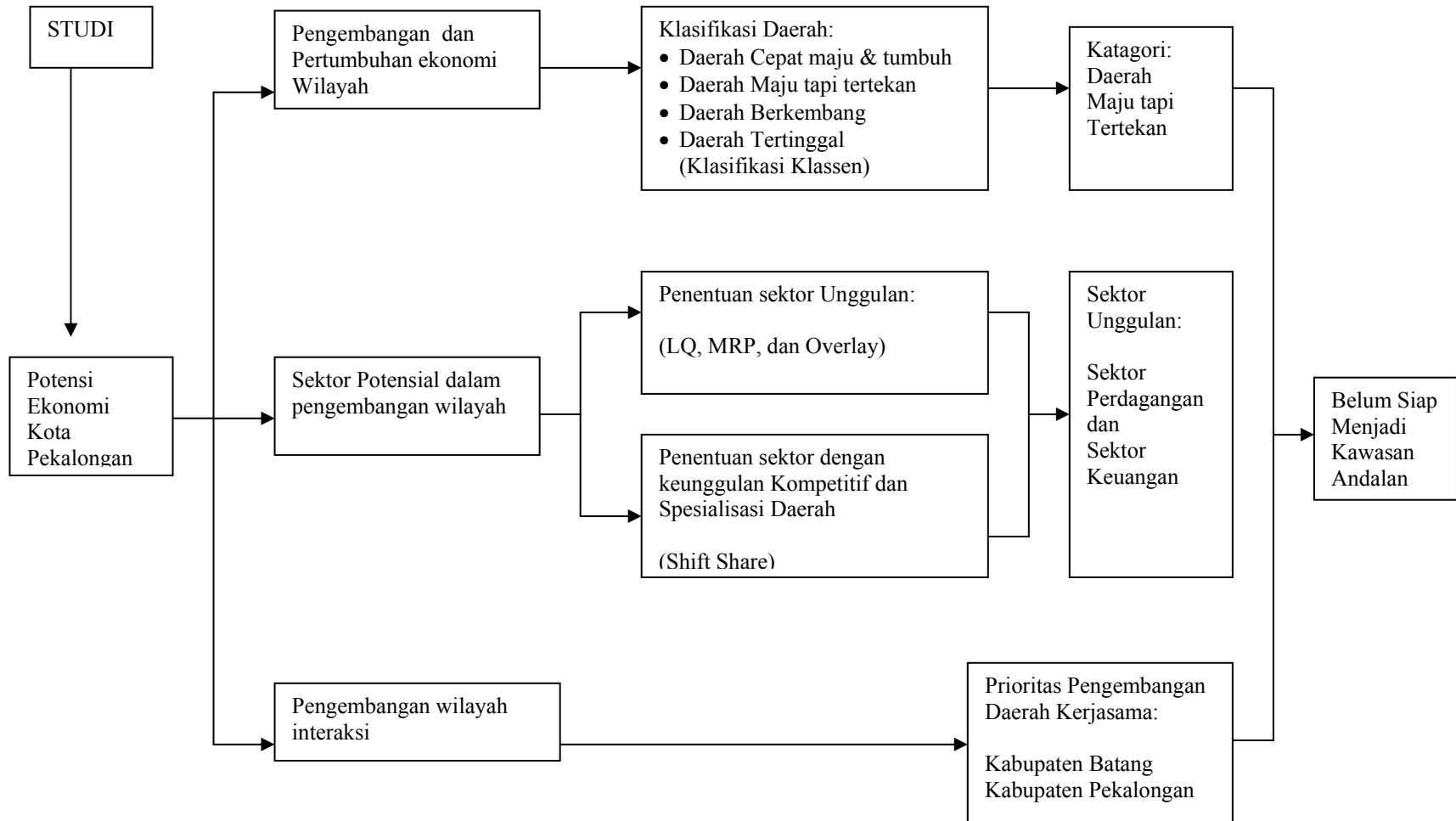
Dari komparasi yang dilakukan dapat disimpulkan penetapan Kota Pekalongan sebagai Kawasan Andalan masih perlu dievaluasi dan dikaji secara mendalam. Karena sebagai daerah dengan kriteria cepat tumbuh, Kota Pekalongan tidak terbukti.

Tabel 5.8
Komparasi Ciri Kawasan Andalan dan Hasil Perhitungan Berbagai Alat Analisis

Ciri Kawasan Andalan	Hasil Analisis terhadap Kota Pekalongan	Kesimpulan
Daerah Cepat Tumbuh	Hasil analisis dengan Tipologi Klassen Kota Pekalongan dalam klasifikasi Daerah Maju Tetapi Tertekan	Belum Siap
Mempunyai Sektor Unggulan	Hasil analisis dengan LQ, MPR, Overlay, dan Shift Share Kota Pekalongan mempunyai banyak sektor-sektor unggulan yaitu sektor Perdagangan dan sektor Keuangan yang mempunyai keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi.	Sudah Siap
Mempunyai Keterkaitan Ekonomi	Hasil analisis dengan Model Gravitasi Kota Pekalongan mempunyai keterkaitan ekonomi yang tinggi dengan daerah Batang dan Kajen (Kabupaten Pekalongan)	Sudah Siap

Sumber: Data diolah

Gambar. 5.4. Hasil Analisis Pengembangan Kota Pekalongan sebagai Kawasan Andalan



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Hasil Analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kota Pekalongan adalah daerah maju tapi tertekan. Karena rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah sedangkan PDRB perkapita Kota Pekalongan lebih tinggi dari PDRB perkapita Jawa Tengah.
2. Hasil analisis overlay maupun hasil Shift Share menunjukkan bahwa sektor keuangan dan sektor jasa perdagangan adalah dua sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Kedua sektor tersebut potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan.
3. Hasil analisis Shift Share memperlihatkan bahwa. Perubahan PDRB dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar Rp. 126.260,60 juta. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh Komponen pertumbuhan ekonomi Regional Jawa Tengah, komponen bauran industri, komponen keunggulan kompetitif, dan komponen pengaruh kompotitif.
4. Hasil analisis Gravitasi memperlihatkan indeks gravitasi selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 nilai indeks

gravitasi Kota Pekalongan dengan Batang dan Kajen menunjukkan nilai indeks gravitasi tertinggi dan memiliki kecenderungan yang meningkat.

5. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dipakai membuktikan bahwa Kota Pekalongan sejak ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan di Jawa Tengah yaitu tahun 2003 hingga tahun 2006 belum siap.

6.2. Saran.

1. Kota Pekalongan harus memberikan prioritas utama terhadap Keuangan dan jasa perdagangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus spesialisasi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, tanpa harus mengabaikan sektor-sektor lain terutama sektor industri yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Pekalongan.
2. Kota Pekalongan perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan jasa perbankan, kesehatan, pendidikan, dan jasa perdagangan atau fasilitas-fasilitas jasa lainnya yang kurang dimiliki oleh daerah sekitarnya guna meningkatkan daya kompetitif dan daya tarik bagi masuknya sumber-sumber ekonomi dari luar Kota Pekalongan.
3. Perlu dikembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan daerah sekitar Kota Pekalongan terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah Kota Pekalongan, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan dengan mensinergikan program-program atau

kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil pembangunan yang optimal, tanpa mengabaikan kerjasama dengan daerah lain terutama yang berada dalam wilayah eks Karesidenan Pekalongan.

4. Keterbatasan penelitian ini terletak pada data yang dianalisis hanya mencakup waktu tiga tahun dan minimnya dukungan data terkait dengan daerah sekitar Kota Pekalongan. Demikian juga asumsi yang mendasari bahwa pola permintaan di daerah adalah identik dengan pola permintaan regional melemahkan daya andalnya. Oleh karena itu memperoleh hasil yang lebih akurat bila data yang dianalisis mencakup periode pengamatan yang cukup panjang misalnya 10 sampai dengan 20 tahun. Selain itu sektor yang menjadi sektor unggulan daerah dan pergerakan sumber-sumber ekonomi antarkota/ kabupaten perlu dianalisis lebih dalam dengan melakukan penelitian yang bersifat kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto DP (2003), Identifikasi Potensi Ekonomi Kota Pekalongan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1. No.1 Maret 2003. 24-38, FE Unikal, Pekalongan.
- A. Ika Rahutani (2002), Public Private Partnership: Suatu Solusi Penyelenggaraan Otonomi daerah yang Berbasis Kompetensi, *Jurnal ,Ekonomi dan Bisnis, Dian Ekonomi*, Vol. VIII No. 1 Maret 2002, 108-119, FE UKSW, Salatiga
- Budiono, 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- BAPPEDA dan BPS Jateng, Produk Domestik Bruto Jawa Tengah 1999, Semarang
- BAPPEDA dan BPS Jateng, Produk Domestik Bruto Jawa Tengah 2003, Semarang
- BAPPEDA dan BPS Jateng, Produk Domestik Bruto Jawa Tengah 2005, Semarang
- BPS Kota Pekalongan (2002), Pekalongan dalam Angka 2002, Pekalongan
- BPS Kota Pekalongan (2002), PDRB Kota Pekalongan 2002, Pekalongan
- BPS Jawa Tengah (2002), Jawa Tengah dalam Angka 2002, Semarang
- BP3M, Kota Pekalongan, Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan tahun 2003, Pekalongan
- Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan dan Transmigrasi (2007), Pengembangan Data Base Ketenagakerjaan, *Makalah yang disampaikan* dalam forum diskusi.
- Erma Setyawati dan Rina Trisnawati, 2003, Analisis Potensi daerah untuk mengembangkan Wilayah di Eks-Karesidenan surakarta menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2, No. 2 September 2003, FE UMS, Surakarta.
- Fashbir Noor Sidin, 2001, Strategi Kebijakan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Hal 15-37.

- Gatot Dwi Adiatmojo, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dengan Optimas Pemanfaatan Sumberdaya Alam Untuk Membangun Perekonomian Dengan Basis Pertanian (Di Kabupaten Musi Banyuasin)*, *Posted July . download.*
- Irawan dan Suparmoko , 2002 , *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta
- Jamzani Sodik dan Nia Septia Ardayani, 2005, Analisis Potensi Pengembangan Eks Karesidenan Banyumas, *Jurnal, Kajian Bisnis, Mei, Vol.13, No.2,*
- Jhingan, Ml 1992 *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, 2002, Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi empiris di Kalimantan selatan 1993-1999, ***Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 17, No.1, 2002.***
- , 1996, *Pembangunan Regional di Indonesia Beberapa Catatan Menjelang Abad ke 21*, Unisia, Yogyakarta
- , 2002, *Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, AMP YKPN, Yogyakarta
- ,2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta
- ,2001, *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- , 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- , 1997, ” Otonomi Daerah dalam Transisi” pada *Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global, 12 April, Yogyakarta*
- Lincoln Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Regional, BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho SBM, 2004, Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan pembangunan Daerah, *Jurnal, Dinamika Pembangunan, Juli, Vol. 1, No.1, Hal 23-29*
- Mardiasmo, 2000, Globalisasi Perekonomian Sistem Ekonomi Nasional, dan Otonomi daerah, ***Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal 1-14.***

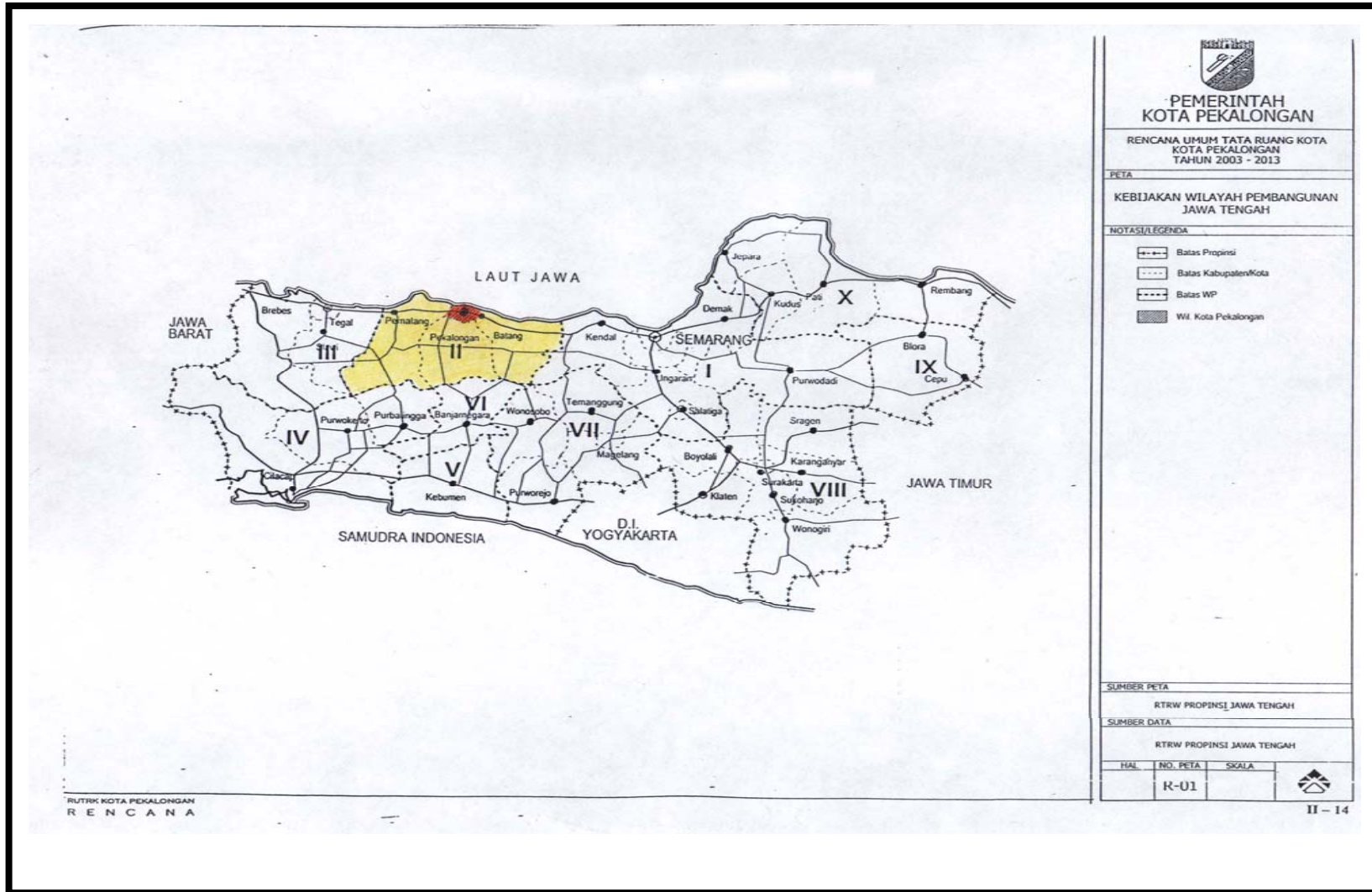
- Prasetyo Soepomo, 1999, Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan daerah, *Jurnal, ekonomi dan Bisnis Indonesia, vol 14, No 4, 4-24.*
- , 2001. Teori Pertumbuhan berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional, *Jurnal, Ekonomi dan Bisnis Indonesia, vol 16, No 1, 41-53.*
- , 1993, Analisis Shift –Share: Perkembangan dan Penerapan, *Jurnal, Ekonomi dan Bisnis Indonesia, vol 16, No 1, 43-54.*
- Rahardjo Adisasmita, 2005, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Richardson, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, FEUI, Jakarta.
- Robinson Tarigan, 2004, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rudi Baharudin, 1999, Pengembangan Wilayah Potensi Provinsi DIY (pendekatan Teoritis), *Jurnal Ekonomi, Vol 4. No.2 VIII, Yogyakarta.*
- Samsubar Saleh, 1990, *Statistik Deskriptif*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma 3 Maret 1997*. Jakarta.
- Sritua Arif, 1993, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, UI, Jakarta
- Sumitro, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Suryana . 2000, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta
- Tambunan. 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro, MP, 1987, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid 1*, Erlangga, Jakarta

World Bank. 2000, *The Quality of Growth, Kualitas Pertumbuhan*, Gramedia, Jakarta.

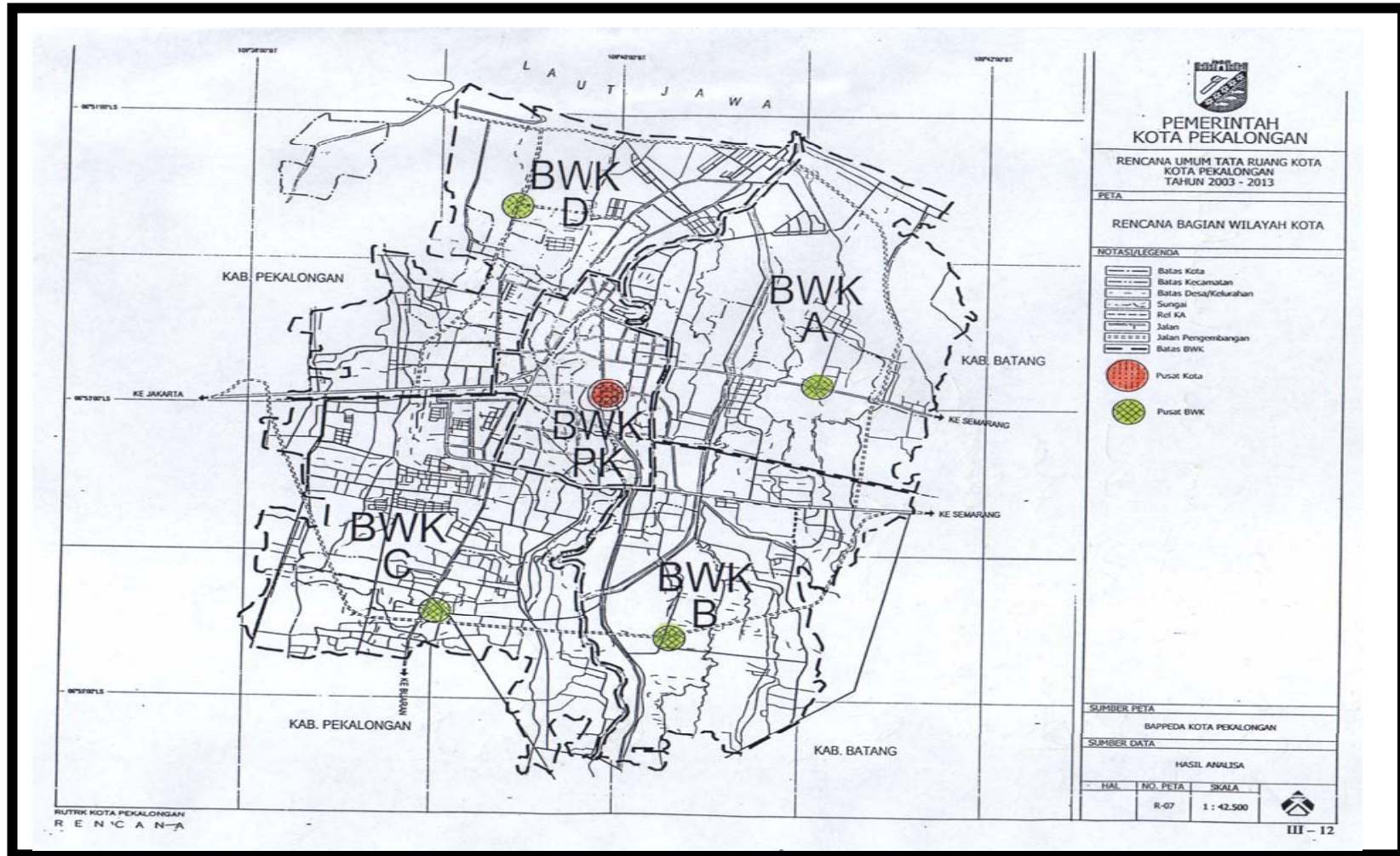
Taufiq M dan Syirod S (2002), Potensi Relatif Sektor-Sektor Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan, *Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1 No.1 Juni. Hal 1-13*

Wiyadi dan Rina Trisnawati, 2002,, Analisis Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah Di Eks - Karesidenan Surakarta Menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan, Fokus Ekonomi, Desember 2002, *download*.

LAMPIRAN 9. PETA KEBIJAKAN WILAYAH PEMBANGUNAN JAWA TENGAH



LAMPIRAN 10. RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA





Gb. 1

Gb. 1 dan 2

Sentra Perbelanjaan Pasar Grosir Kota Pekalongan di Desa Setono Kecamatan Pekalongan Timur



Gb. 2



Gb. 3



Gb. 4



Gb. 5



Gb. 6

Gb. 3 dan 4

Jenis alat transportasi yang lazim digunakan penduduk Kabupaten Batang untuk memasuki Kota Pekalongan di perbatasan Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah Timur, disamping jenis alat transportasi lain

Gb. 5 dan 6

Jenis alat transportasi yang lazim digunakan penduduk Kabupaten Batang untuk memasuki Kota Pekalongan di perbatasan Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah Selatan, disamping jenis alat transportasi lain



Gb. 7



Gb. 8



Gb. 9



Gb. 10

Gb. 7,8,9,dan 10

Jenis alat transportasi yang lazim digunakan penduduk Kabupaten Pekalongan untuk memasuki Kota Pekalongan di perbatasan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di sebelah Barat, disamping jenis alat transportasi lain



Gb. 11

Gb. 11
Mobilitas Tenaga Kerja
pada pagi hari dari arah
Kabupaten Batang ke
Kota Pekalongan



Gb. 12

Gb. 12
Mobilitas Tenaga Kerja
pada pagi hari dari arah
Kabupaten Pekalongan
ke Kota Pekalongan

